

UPAYA *NATIONAL LAND COALITION* DALAM REFORMA AGRARIA

DI FILIPINA 2021-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GRANDIS NOVIYANA

21323005

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

UPAYA NATIONAL LAND COALITION DALAM REFORMA AGRARIA

DI FILIPINA 2021-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GRANDIS NOVIYANA

21323005

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA NATIONAL LAND COALITION DALAM REFORMA AGRARIA
DI FILIPINA 2021-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

Senin, 08 September 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025.



Grandis Noviyana

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR SINGKATAN	9
ABSTRAK	10
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>16</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	18
2.1 Konteks Krisis Agraria di Filipina	18
<i>2.1.1 Ketimpangan Agraria Tahun 2021-2024</i>	<i>18</i>
<i>2.1.2 Politik Agraria di Bawah Duterte & Marcos Jr Tahun 2021-2024</i>	<i>25</i>
<i>2.1.3 Alih Fungsi Lahan Tahun 2021-2024</i>	<i>27</i>
<i>2.1.4 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024</i>	<i>30</i>
2.2 Respon Terhadap Tingginya Kebutuhan Reforma Agraria di Filipina	34
BAB 3	38
3.1 Koalisi National Land Coalition Filipina dalam Membangun Kekuatan Kolektif	38
3.2 Lobi National Land Coalition dalam Reforma Agraria di Filipina	45
3.3 Kampanye National Land Coalition dalam Mendorong Perubahan Reforma Agraria di Filipina	49
BAB 4	59
4.1 Kesimpulan	59

4.2 Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Table 1. CARP Distribusi Lahan (Hectares) di Filipina Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 2. Tren Reforma Agraria Filipina 2021–2024.....	21
Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Agraria antara era Duterte dan Marcos JR 2021-2024.....	23
Tabel 4. Tabel Jumlah lahan yang Terkena Eksploitasi dan Jumlah Proyek Penambangan Legal di Filipina tahun 2020-2023.....	26
Tabel 5. Data dari Jumlah Korban Akibat Pelanggaran HAM di Filipina 2021-2024.....	27
Tabel 6. Tabel Anggota Koalisi Beserta Fungsinya.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo <i>National Land Coalition</i> di Filipina.....	11
Gambar 2. Aksi Jalan Kaki Petani Sumilao dari Bukidnon ke Manila Dukung Leni Robredo.....	46
Gambar 3. Kampanye yang dilakukan Oleh <i>Task Force Mapalad</i> (TFM) di depan Kantor DAR pada 10 Juni 2024.....	48
Gambar 4. Postingan Instagram @sabaytones atau Jun Sabayton tentang Hari Jadi <i>Department of Agrarian Reform</i>	50

DAFTAR SINGKATAN

AFA	: Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development
ANGOC	:Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development
ARB	: Agrarian Reform Beneficiaries
AR NOW!	: People's Campaign for Agrarian Reform Network
BHR	: Business and Human Rights
CARP	: Comprehensive Agrarian Reform Program
CARPER	: Comprehensive Reforms on Agrarian Reform Program Extension with Reforms
CARRD	: Centre for Agrarian Reform and Rural Development
CSO	: Civil Society Organizations
DA-ATI	: Department of Agriculture-Agricultural Training Institute
DAR	: Department of Agrarian Reform
ECJ	: Eduardo Cojuanco Junior
EJK	: Extra-Judicial Killings
EO	: Executive Order
ESMF	: Environmental and Social Management Framework
FAO	: Food and Agriculture Organization
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILC	: International Land Coalition
IPLC	: Indigenous Peoples and Local Communities
IRR	: Implementing Rules and Regulations
LAD	: Land Acquisition and Distribution
LBP	: Land Bank of the Philippines
LED	: Land and Environment Defenders
LRCM	: Land and Resource Conflict Monitoring
NAEA	: New Agrarian Emancipation Act
NCIP	: National Commission on Indigenous Peoples
NLC	: National Land Coalition
NLC Ph	: National Land Coalition Philippines
NGO	: Non-Governmental Organization
NTWG-FF	: National Technical Working Group on Family Farming
NTWG-LF	: National Technical Working Group on Lands and Forests
PAP4FF	: Philippine Action Plan for Family Farming
PARC	: Presidential Agrarian Reform Council
PBSP	: Philippine Business for Social Progress
RAI	: Responsible Agricultural Investments
SDG	: Sustainable Development Goals
SPLIT	: Support to Parcelization of Lands for Individual Titling
TFM	: Task Force Mapalad
TWG	: Technical Working Group

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran *National Land Coalition* (NLC) Filipina dalam implementasi reforma agraria pada periode 2021–2024 menggunakan kerangka teori Helen Yanacopulos (2005) tentang strategi koalisi NGO. Filipina menghadapi krisis agraria struktural akibat ketimpangan kepemilikan lahan, konversi lahan skala besar, dan pelanggaran HAM terhadap petani. NLC, sebagai koalisi terdiri dari sembilan NGO, berperan melalui tiga strategi utama: (1) koalisi dengan membangun aliansi multi-pemangku kepentingan; (2) lobi kebijakan seperti *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA); dan (3) kampanye mobilisasi massa dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NLC berhasil mendorong distribusi 4.654 hektar lahan, melindungi 6.000 keluarga petani, dan memengaruhi kebijakan nasional. Namun, tantangan seperti resistensi elite dan lemahnya implementasi kebijakan tetap ada. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan kolektif dan adaptif dalam lobi agraria.

Kata-kata kunci: Isu HAM, Ketimpangan Agraria, Koalisi NGO, Reforma Agraria, NLC Filipina.

ABSTRACT

This study examines the role of the National Land Coalition (NLC) Philippines in implementing agrarian reform from 2021 to 2024, employing Helen Yanacopulos's (2005) NGO coalition theory. The Philippines faces structural agrarian crises due to land inequality, large-scale land conversion, and human rights violations against farmers. As a coalition of nine NGOs, NLC employed three key strategies: (1) coalition-building with multi-stakeholder alliances; (2) lobbying for policies like the New Agrarian Emancipation Act (NAEA); and (3) campaigns through mass mobilization and media. Findings reveal NLC's success in facilitating the distribution of 4,654 hectares of land, protecting 6,000 farmer families, and influencing national policies. However, challenges such as elite resistance and weak policy implementation persist. The study underscores the significance of collective and adaptive approaches in agrarian lobby.

Keywords: *Agrarian Inequality, Agrarian Reform, Human Rights, NLC Philippines, NGO Coalition.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara, di sebelah timur Asia dan di sebelah barat Laut Cina Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di barat, Laut Filipina di timur, dan Laut Sulu dan Laut Celebes di selatan. Luas wilayah Filipina sekitar 300,000 km², dengan 115,830 km² adalah daratan dan 707 km² adalah perairan. Filipina memiliki luas tanah yang relatif kecil, hanya sekitar 115,830 km², namun memiliki populasi yang sangat besar, sekitar 116,628,000 jiwa (2024 est.). Wilayah Filipina dibagi menjadi tiga wilayah utama, yaitu Luzon di utara, Visayas di tengah, dan Mindanao di selatan. Luzon adalah pulau terbesar dengan luas sekitar 105,000 km², sedangkan Mindanao memiliki luas sekitar 95,000 km² (USAID 2017).

Krisis agraria di Filipina memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari masa kolonial Spanyol dan Amerika, yang memperkenalkan sistem *hacienda*. Sistem ini menyebabkan konsentrasi kepemilikan tanah di tangan elite, sementara petani dan masyarakat adat terjebak dalam kemiskinan. Hingga 2020, hanya 50% lahan yang direncanakan untuk didistribusikan yang berhasil terdistribusi (ILC 2023). Sektor pertanian Filipina menghadapi tantangan struktural, termasuk ketergantungan tinggi terhadap impor pangan, yang mengancam ketahanan pangan nasional (Behind Philippine 2024).

Banyak negara berkembang menghadapi konflik agraria yang mirip, seperti Indonesia dengan sengketa perkebunan sawit di Kalimantan atau Papua, atau Brasil dengan perjuangan *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*

(MST) melawan pemilik tanah besar. Namun, konteks Filipina unik dalam beberapa hal. Pertama, warisan kolonial Amerika dan sistem *hacienda*-nya menciptakan struktur agraria yang sangat feodal dan oligarkis, bahkan pasca-kemerdekaan (Borras 2001). Kedua, konflik di Mindanao dan wilayah adat lainnya diperumit oleh dimensi *etno-religius* dan sejarah separatism yang tidak selalu ditemukan dalam kasus negara lain. Ketiga, tingkat kekerasan dan pembunuhan terhadap pembela tanah (*land defenders*) dan aktivis agraria di Filipina secara konsisten termasuk yang tertinggi di Asia, sebuah tren yang dicatat oleh organisasi pemantau global seperti Global Witness (2023) (Global Witness 2023). Hal ini membedakan resistensi negara dari negara tetangga dan menempatkannya dalam sorotan internasional yang lebih intens (Global Witness 2023).

Filipina penting untuk dipelajari justru karena tingkat perlawanan masyarakat sipilnya yang sangat terorganisir dan vokal, meskipun menghadapi represi yang berat. Jaringan NGO dan koalisi akar rumput seperti *Kilusang Magbubukid ng Pilipinas* (KMP) atau *Asian Farmers Association* (AFA) telah berhasil menginternasionalisasikan perjuangan mereka, membangun solidaritas transnasional, dan mendorong tekanan global terhadap pemerintah Filipina (Franco and Borras 2007). Selain itu, peran masyarakat adat (Lumad di Mindanao dan suku-suku di Luzon Utara) dalam mempertahankan wilayah adat dari incaran perusahaan pertambangan dan agribisnis menjadi contoh utama dari perjuangan untuk kedaulatan pangan dan ekologi (ILC Report 2023).

Menurut Gunawan Wiradi seorang ahli sosiologi pedesaan dan agraria, reforma agraria ialah “Penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, khususnya tanah, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Wiradi 2000).

Reformasi agraria, seperti *Agricultural Land Reform Code* 1963 dan *Comprehensive Agrarian Reform Program* (CARP) 1988, tidak berhasil maksimal karena perlawanan pemilik tanah dan kurangnya dukungan bagi petani. CARP, yang diluncurkan oleh Presiden Corazon Aquino, bertujuan untuk redistribusi lahan kepada petani tanpa tanah, namun hingga 2020, hanya 50% lahan yang ditargetkan yang telah didistribusikan (Rural realities: CARP decades later - The GUIDON, 2023). Meskipun ada kemajuan dalam distribusi lahan, tantangan kebijakan dan resistensi dari pemilik tanah tetap menjadi hambatan (Fabela 2017, CPBRD 2024).

Era di bawah pemerintahan Duterte dan Marcos Jr. (2016-2024), konflik agraria meluas, melibatkan lebih dari 1 juta hektar tanah, terutama di wilayah masyarakat adat. Kegagalan implementasi reforma agraria menjadi penyebab utama konflik ini, dengan kinerja distribusi tanah yang buruk di era Duterte (Katarungan 2023). Marcos Jr. mengeluarkan *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA) pada 2023, yang membebaskan utang petani, tetapi tidak menyelesaikan masalah struktural yang ada (Global Witness n.d).

Menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan dukungan bagi petani, kedua kebijakan masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan. Pemerintahan Duterte mencoba untuk memperkuat implementasi reforma agraria dengan mengaktifkan kembali *Presidential Agrarian Reform Council* (PARC), tetapi masih menghadapi kendala dalam pelayanan pendukung dan pencapaian target distribusi tanah. Sementara itu, *New*

Agrarian Emancipation Act (NAEA) yang dicanangkan oleh Marcos Jr (Bernal dan Esmaguilan 2020, 20). memberikan bantuan finansial bagi petani, tetapi tidak menyelesaikan masalah kronis dalam program reforma agraria dan tidak memberikan jaminan perlindungan hak petani. Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa reforma agraria di Filipina memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan petani secara efektif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui kebijakan reforma agraria, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi petani Filipina jauh lebih dalam dari sekadar implementasi kebijakan (Gozum 2023).

Sektor pertanian Filipina mengalami kerugian ekonomi besar, mencapai P57,8 miliar pada tahun 2024, naik 136,4% dari tahun sebelumnya, berdampak pada lebih dari 1,4 juta petani dan nelayan (Gozum 2025; Ordinario 2025). Penurunan hasil pertanian di semua sektor pada tahun 2024 mengurangi pendapatan petani dan pasokan makanan (Gozum 2025; Ordinario 202). Sekitar 51 juta warga Filipina mengalami kerawanan pangan, diperparah oleh distribusi makanan yang sulit, kurangnya teknologi di bidang pertanian, dan kenaikan harga pangan. Meskipun tingkat kemiskinan nasional menurun, petani dan nelayan tetap menjadi kelompok termiskin. Melihat bagaimana perubahan lanskap pedesaan akibat hilangnya mata pencaharian pertanian dan perpindahan lahan telah memicu migrasi besar-besaran ke perkotaan, penting juga untuk menyoroti faktor lain yang turut memperparah krisis lingkungan dan sosial, yaitu deforestasi dan aktivitas pertambangan yang merusak.

Jumlah proyek pertambangan mineral di Filipina meningkat signifikan dari 79 pada tahun 2020 menjadi 120 pada tahun 2023 (MGB 2020-2023). Meskipun luas lahan yang dieksploitasi sedikit berfluktuasi, tren peningkatan proyek pertambangan ini menunjukkan dampak yang terus-menerus terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, seperti kasus tambang emas dan tembaga *OceanaGold Corporation* di Didipio yang menyebabkan konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Sepertiga dari wilayah di Filipina telah dijadikan area pertambangan. Karena aksi protes akibat kerusakan lingkungan yang dialami akibat aktivitas pertambangan para petani dan masyarakat adat melakukan penolakan, akan tetapi hal tersebut malah banyak memakan korban yang melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, terus terjadi di Filipina, dengan petani dan masyarakat adat menjadi target utama (Karapatan Report 2024). Meskipun ada penurunan jumlah kasus EJK di bawah Marcos Jr., pelanggaran HAM tetap menjadi tantangan serius. Koalisi NGO agraria di Filipina berperan penting dalam advokasi keadilan agraria dan mendorong perubahan kebijakan melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down* (ILC Contribution analysis 2023).

Dalam menghadapi negara yang sering abai dan represif, organisasi non-pemerintah (NGO) dan koalisi masyarakat sipil menjadi tulang punggung perlawanan. Dukungan teknis dari NGO *grassroot* dan mitra yang tergabung dianggap banyak membantu pemerintah Filipina dalam merumuskan dan menerapkan praktik perubahan pertanahan yang lebih adil dan efektif. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain melalui koalisi membuka peluang bagi Filipina untuk mempelajari praktik terbaik dan menerapkannya

dalam konteks lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta mengurangi konflik (National Land Coalition 2021).

Dukungan teknis dari yang berasal dari NGO *grassroot* dan mitra yang tergabung dianggap banyak membantu pemerintah Filipina dalam merumuskan dan menerapkan praktik perubahan pertanahan yang lebih adil dan efektif. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain melalui koalisi membuka peluang bagi Filipina untuk mempelajari praktik terbaik dan menerapkannya dalam konteks lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta mengurangi konflik (NLC Report 2021)

Dengan misi utama untuk mengadvokasi reforma agraria dan mempromosikan tata kelola lahan yang berpusat pada rakyat, *National Land Coalition* Filipina berperan sebagai *platform* kolektif untuk memperkuat suara petani dan masyarakat adat dalam menuntut hak-hak mereka. NLC secara khusus berkomitmen pada dua janji penting yaitu, melindungi dan memberdayakan perempuan serta pembela lahan dalam jaringannya, mengakui peran krusial mereka dalam perjuangan hak atas tanah (NLC Ph Report 2021). Pembentukan NLC mencerminkan pengakuan bahwa perubahan agraria yang sejati memerlukan upaya yang terkoordinasi, advokasi yang kuat, dan dukungan langsung kepada komunitas di garis depan perjuangan tanah.

Keterlibatan NLC dengan komunitas yang terpinggirkan melalui pelatihan paralegal dan bantuan langsung dan lembaga pemerintah seperti DAR, FAO, dan Bank Dunia menunjukkan peran pentingnya sebagai aktor penghubung. NLC

mampu menerjemahkan kebutuhan komunitas menjadi advokasi kebijakan dan memfasilitasi implementasi program pemerintah seperti SPLIT. Hal ini menyoroti sifat masyarakat sipil yang sangat diperlukan dalam mengisi kesenjangan tata kelola (ILC Report 2023).

Kerugian ekonomi besar di sektor pertanian, kerawanan pangan yang meluas, kemiskinan akut di kalangan petani dan nelayan, serta degradasi lingkungan akibat ekspansi pertambangan yang masif. Konflik agraria yang meluas dan pelanggaran HAM sistematis terutama pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap petani dan pembela tanah menjadi bukti nyata ketegangan sosial yang meledak. Dalam konteks inilah, peran koalisi masyarakat sipil seperti *National Land Coalition* (NLC) Filipina menjadi krusial sebagai kekuatan penyeimbang yang melakukan advokasi *bottom-up* dan *top-down*, mendampingi komunitas, serta mendorong tata kelola lahan yang lebih adil (ILC Report 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya *National Land Coalition* dalam reforma agraria oleh di Filipina Tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi 3 poin yaitu untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh *National Land Coalition Philippines* sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pada petani di Filipina 2021-2024.

2. Mengetahui hasil dari kerjasama antar koalisi dan proses lobi aktif yang dilakukan oleh *National Land Coalition* di Filipina 2021-2024.
3. Mengetahui strategi kampanye yang dilakukan oleh *National Land Coalition philippines* sektor agraria 2021-2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini meliputi rentang tahun 2021-2024. Filipina menghadapi masalah agraria yang kompleks, termasuk ketimpangan kepemilikan lahan, konflik agraria, dan lemahnya implementasi reforma agraria. Pada periode 2021, Fase awal fokus pada keterlibatan kritis dengan pemerintah terkait reforma agraria, pertanian keluarga, dan BHR. Terutama NLC *Philippines* dalam mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel terhadap janji-janji reforma agraria. Namun, lemahnya komitmen politik negara tercermin dari keberlanjutan praktik clientelism, dominasi elite pemilik tanah, dan instrumentalitas kebijakan agraria yang lebih condong melayani kepentingan investasi ketimbang melindungi petani. Diakhiri pada periode 2024 karena periode ini secara khusus menyoroti upaya NLC Ph dalam mengaktifkan kemitraan multi-pemangku kepentingan, melembagakan reformasi kebijakan dan praktik, serta beradaptasi dengan pergeseran ancaman dari kekerasan langsung menjadi akuisisi lahan skala besar yang agresif.

Dengan demikian, Juni 2024 menjadi titik akhir untuk penelitian ini, karena merefleksikan data terbaru yang tersedia untuk mengevaluasi dampak dan adaptasi strategis NLC Ph dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus

berkembang. Dalam penulisan ini, penulis Cakupan ini memastikan bahwa penelitian akan memberikan gambaran tentang bagaimana NLC Ph beroperasi sebagai koalisi NGO yang strategis dalam memajukan reforma agraria di Filipina, serta relevansi teori Yanacopulos 2005 dalam menganalisis kasus ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk memahami dan mendalami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka, yaitu dengan mengkaji kembali literatur yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah pada peran yang dilakukan oleh koalisi *Non- Governmental Organization* (NGO) di Negara Filipina untuk praktik perubahan dapat berdampak langsung bagi kelompok. Terdiri dari 9 NGO pertanian di Filipina telah berhasil mencapai beberapa kemajuan yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan dalam sektor pertanian di Filipina.

Literatur pertama diambil dari salah artikel di jurnal *Asian Journal of Agriculture and Development* berjudul “*Factors Influencing the Technical Efficiency of Smallholder Cacao Farmers in Davao de Oro, Philippines 2021*”. oleh Shemaiah Gail P. Placencia, Alessa Keith E. Carbonell¹, Larry N. Digal, and Carol Q. Balgos. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis (TE) petani kakao skala kecil di Davao de Oro, Filipina, menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata petani kakao di daerah tersebut beroperasi secara tidak efisien. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor publik, dan swasta untuk mengatasi tantangan yang ada,

dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, hubungan pasar, dan pelatihan teknis (Placencia 2021, 1).

Penelitian kedua dari jurnal *human relations* tinjauan dari artikel berjudul “*Development as Freedom? Insight from Farmer-Led Sustainable Agriculture Non-Governmental Organization in The Philippines*” oleh Gavin Jack, Jagjit Plane dan Sarah Wright tahun 2022. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kebebasan, pekerjaan, dan organisasi berhubungan satu sama lain. Studi lapangan kolaborasi antar *Non- Governmental Organization* (NGO) yang mendukung pertanian berkelanjutan memungkinkan peneliti untuk mempertanyakan dan memperluas teori pluralistik tentang kebebasan Amartya Sen. Studi ini menemukan kebiasaan relasional yang mempromosikan kebebasan substantif, seperti "*freedom with*", yang menekankan pentingnya kerja sama untuk kemajuan. Agroekologi memperluas sejarah pengorganisasian alternatif *Global South* dan serta memperluas peran dari organisasi alternatif dari *Global South* (Wright 2022,).

Selanjutnya, jurnal dari *platform* kebijakan agrikultur, penelitian ketiga dari jurnal yang berjudul “*The Current State, Challenges and Plans for Philippine Agriculture*” oleh Ernesto O. Brown, Fezoil Luz C. Decena, dan Reynaldo V. Ebor. Pada tahun 2018. Sistem inovasi pertanian negara Filipina memainkan peran penting dalam implementasi tujuan rencana pembangunan jangka menengah di bidang pertanian. lemahnya penyuluhan, tidak lengkapnya implementasi program reforma agraria, petani, dan nelayan. Konektivitas yang terbatas antara wilayah produksi dan pasar, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar produk mengakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian (FFTC-AP 2018).

Tujuan dari pengumpulan tinjauan ini adalah mengumpulkan tulisan ilmiah untuk digunakan sebagai tinjauan pustaka. Ini dilakukan untuk menghindari kesamaan topik, jangkauan, dan isi, serta untuk membuat perbedaan yang jelas antara tulisan yang baru diterbitkan dan tulisan sebelumnya.

Dari semua penelitian yang penulis review, belum ada penelitian yang secara khusus melihat bagaimana *National Land Coalition Philippines* pertanian di Filipina dapat memberikan dampak perubahan menggunakan teori *Non-governmental Organization Coalition*. Pembaruan dari ketiga penelitian diatas menunjukkan pentingnya reformasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mengurangi konflik lahan, bahwa kerja sama antara petani dan *Non- Governmental Organization* (NGO) dapat menciptakan akses lahan yang lebih besar dan kemajuan yang berkelanjutan dalam pertanian serta, menyoroti perlunya peningkatan penyuluhan, implementasi reforma agraria yang lebih baik, dan upaya peningkatan daya saing produk pertanian melalui peningkatan standar dan konektivitas. Menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan redistribusi tanah dalam mencapai hasil yang sukses. Mengkaji keterkaitan organisasi dalam organisasi non-pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran

***Non-Governmental Organization Coalition* oleh Helen Yanacopulos**

Adapun dalam penelitian ini, penulis menganalisis dalam menggunakan model pendekatan oleh Helen Yanacopulos (2005) dalam "*The Strategies that*

Bind: NGO Coalitions and their Influence" menjelaskan tiga strategi utama NGO coalition: koalisi, lobi, dan kampanye.

1. Koalisi biasanya dibentuk untuk menangani tujuan yang luas dan beragam, memerlukan tingkat komitmen yang tinggi dari setiap organisasi anggotanya. Setiap anggota koalisi memiliki hubungan langsung dengan komunitas akar rumput, sementara koalisi itu sendiri beroperasi di tingkat nasional dan internasional, sesuai dengan struktur organisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi tidak hanya bertukar informasi itu memiliki tujuan yang lebih besar untuk mempengaruhi pemerintah. Karena melibatkan kolaborasi antar-organisasi yang berorientasi jangka panjang, di mana setiap mitra membuat investasi signifikan dalam membangun operasi bersama, jenis kolaborasi ini sering disebut sebagai "aliansi strategis" dalam literatur nirlaba. Koalisi juga memerlukan tujuan yang disepakati bersama, komitmen terhadap sumber daya. aktor kunci dalam pembentukan koalisi ini adalah strategi yang jelas dan terarah, yang menjadi pendorong utama untuk menciptakan aliansi yang kuat dan berkelanjutan (Yanacopulos 2005).
2. Lobi merupakan proses yang lebih terarah dan strategis, yang mengharuskan pelaku lobi memiliki kemampuan persuasi yang baik, pemahaman mendalam tentang isu yang dibahas, serta keterampilan negosiasi yang mumpuni. Dalam proses ini, pendekatan yang bijaksana dan profesional lebih diutamakan daripada serangan terhadap pihak lain, karena individu atau organisasi yang menjadi target justru bisa merusak tujuan. Tidak hanya membantu membangun fondasi yang kuat untuk

kampanye, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam kampanye tersebut sejalan dengan tujuan organisasi dan dapat memengaruhi kebijakan secara efektif (Yanacopulos 2005).

3. Kampanye dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan tujuan yang jelas kepada publik maupun pihak berwenang. Penyebaran informasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat umum dan pembuat kebijakan adalah tujuan utama dari kampanye ini. Selama prosesnya, kampanye memanfaatkan berbagai media untuk mempengaruhi opini publik atau keputusan yang dibuat oleh otoritas. Seringkali, koalisi atau kelompok tertentu melakukan kampanye sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan. Selain itu, kampanye ini biasanya berfokus pada pengaruh kebijakan, terutama studi kasus atau masalah yang menjadi perhatian utama kelompok tersebut (Yanacopulos 2005).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Non-governmental Organization Coalition* yang dikembangkan oleh Helen Yanacopulos tahun 2005 telah memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dalam pengimplementasiannya untuk *National Land Coalition* di Filipina dalam periode 2021-2024. Koalisi ini tidak hanya memungkinkan aliansi untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian kolektif, tetapi juga memperkuat hubungan antar aliansi melalui pertukaran informasi dan komitmen bersama. Meskipun kolaborasi dalam program mungkin lebih menantang daripada advokasi, pendekatan yang terarah dan strategis dalam lobi serta kampanye telah terbukti efektif dalam mempengaruhi kebijakan dan mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, pendekatan ini adalah kerangka yang kuat untuk memahami dan mempromosikan kerja sama yang lebih efektif dalam sektor agraria Filipina, sejalan dengan praktek perubahan dalam mendorong kemajuan kebijakan sektor pertanian dan pertanahan di negara Filipina.

1.7 Argumen Sementara

Terdiri dari NGO koalisi pertanahan di Filipina yang melakukan praktik perubahan di negara Filipina dalam sektor pertanahan maupun pertanian. selama rentang tahun 2021-2024 koalisi dapat memperluas kolaborasinya dengan berbagai pihak di Filipina melalui pendekatan yang terarah. Dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat tiga poin yang akan dianalisis oleh penulis mengenai Koalisi NGO dalam praktik perubahan sektor pertanian di Filipina antara lain,

(1) Koalisi, dengan mengidentifikasi peran dan pengaruh *National Land Coalition Phillipines* dalam membangun koalisi secara vertikal dengan berbagai lembaga pemerintah Filipina hingga organisasi internasional hingga secara horizontal terhadap mitra NGO.

(2) Lobi dengan mengetahui hasil dari upaya *National Land Coalition Phillipines* melakukan *lobbying* aktif dalam kerjasama antar-koalisi yang kuat dalam NLC Ph, dikombinasikan dengan proses lobi taktis yang adaptif termasuk navigasi transisi politik dan penggunaan aliansi strategis.

(3) Kampanye terkoordinasi yang canggih melalui mobilisasi publik dan keterlibatan media, telah secara kolektif menghasilkan perubahan kebijakan agraria yang signifikan dan peningkatan kapasitas hak atas tanah bagi ribuan petani dan masyarakat adat di Filipina selama periode 2021-2024.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi suatu fenomena sosial. Metode ini melibatkan berbagai teknik salah satunya bersumber dari data sekunder analisis jurnal maupun buku serta teknik etnometodologis lainnya (Berg-B., Lune-H, 2012). Dengan demikian, pada penulisan ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai landasan dasar menganalisis hasil data dan fakta yang berkaitan dengan upaya peranan *National Land Coalition Philippines* pertanahan dalam memberikan dampak praktik perubahan di Filipina dengan rentang waktu 2021-2024.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang merupakan subjek adalah *National Land Coalition Phillipines* sebagai koalisi NGO di Filipina. Objeknya ialah Reforma Agraria yang dilakukan oleh *National Land Coalition Phillipines* pada sektor agraria di Filipina dalam rentang waktu 2021-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Upaya penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai acuan penyusunan penulisan. Data primer tersebut meliputi laporan internal *membership* yang tidak dipublikasikan oleh *International Land Coalition*

(ILC) tahun 2021-2024 dan laporan tahunan dari Karapatan Report tahun 2020-2024. Maupun data sekunder dari jurnal, artikel daring, youtube dari *platform ILC* dan *Behind Phillipines*, buku, dan website resmi.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian diawali dengan mengumpulkan data pengaruh advokasi dari *National Land Coalition Phillipines* agraria di Filipina rentang tahun 2021-2024. Setelah mengumpulkan data yang diambil dari laporan tahunan di website resmi ILC, report internal ILC pada NLC Filipina, buku, jurnal, dan tulisan artikel, selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *Non-governmental Organization Coalition* oleh Helen Yanacopulos mengenai bagaimana *National Land Coalition Phillipines* agraria melakukan praktik perubahan di Filipina.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan

Penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Krisis Agraria dan Respon NLC di Filipina Tahun 2021-2024

Penulis pada bab ini akan membahas terkait fenomena krisis agraria, meliputi ketimpangan agraria tahun 2021-2024, politik agraria pada masa Presiden Duterte dan Marcos JR, dan alih fungsi lahan dari kerusakan lingkungan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina adalah peringkat satu di Asia untuk

pembunuhan *Land Defenders*. Koalisi dari *National Land Coalition Phillipines* dalam Respons terhadap tingginya kebutuhan reforma agraria.

Bab III: Upaya *National Land Coalition* dalam Reforma Agraria di Filipina Tahun 2021-2024

Penulis menjelaskan terkait analisis peran yang dilakukan oleh *National Land Coalition* di Filipina sektor agraria pada rentang tahun 2021 - 2024 menggunakan teori *Non-governmental Organization Coalition* yang diperkenalkan Helen Yanacopulos tahun 2005. Bab ini juga mengkaji praktik perubahan yang dilakukan oleh *National Land Coalition Phillipines* dengan poin pendekatan yaitu *coalition, lobby* dan *campaign*.

Bab IV: Penutup

Penulis menuliskan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti oleh penulis.

BAB 2

KRISIS AGRARIA DAN RESPON *NATIONAL LAND COALITION* DI FILIPINA TAHUN 2021-2024

Fenomena krisis agraria di Filipina, bab ini menguraikan konteks krisis agraria yang melanda Filipina selama periode 2021-2024 serta menganalisis respon yang diberikan oleh *National Land Coalition* (NLC) sebagai sebuah koalisi *Non-governmental Organization* (NGO). Analisis dimulai dengan memetakan masalah-masalah struktural dalam sektor agraria, termasuk ketimpangan kepemilikan lahan, arah politik agraria pemerintah, hingga eskalasi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, bab ini akan mendeskripsikan strategi dan program yang diimplementasikan oleh NLC dalam menghadapi tantangan tersebut.

2.1 Konteks Krisis Agraria di Filipina

2.1.1 Ketimpangan Agraria Tahun 2021-2024

Sejarah reforma agraria di Filipina berakar dari ketidaksetaraan lahan yang mendalam yang diwariskan dari era kolonial. Pemerintahan kolonial Spanyol memperkenalkan konsep kepemilikan individu dan hak milik mutlak (*eigendom*), yang secara fundamental berlawanan dengan sistem kepemilikan komunal masyarakat adat (Prakoso, 2015). Hal ini memungkinkan biara-biara Katolik dan elit lokal untuk mengakuisisi tanah dalam skala besar, sering kali melalui pengambilalihan paksa (Anwar, 2017). Ketika Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan, memperkenalkan sistem pendaftaran tanah *Torrens* pada tahun 1903

untuk memberikan kepastian hukum (Filipino, 2011). Namun, sistem ini justru memperburuk ketidaksetaraan karena proses yang mahal dan birokratis hanya dapat diakses oleh para tuan tanah yang kaya dan berpendidikan (Abrar, 2020).

Ketidakadilan struktural ini memicu agitasi dan pemberontakan petani yang terus-menerus, menciptakan lahan subur bagi pertumbuhan gerakan radikal, seperti Partai Komunis Filipina (White & Wiradi, 2017; Carranza, 2015). Akibatnya, reforma agraria sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai strategi politik untuk melemahkan pergerakan komunis dan mempertahankan kekuasaan (White & Wiradi, 2017).

Department of Agrarian Reform (DAR) telah dibentuk pada 10 September 1971, di bawah pemerintahan Ferdinand E. Marcos (DAR). Sebagai respons terhadap tuntutan rakyat setelah kejatuhan Marcos, Presiden Corazon Aquino mengesahkan *Comprehensive Agrarian reform Program (CARP)* pada tahun 1988 (Borras, 2005). Program ini bertujuan untuk mendistribusikan jutaan hektar lahan pertanian kepada petani tanpa tanah (Borras, 2005). Namun, implementasi CARP menghadapi tantangan besar, terutama resistensi dari tuan tanah dan elite politik yang kuat. Banyak pemilik lahan besar menggunakan celah hukum, seperti memecah-mecah kepemilikan mereka menjadi lebih kecil atau mengklasifikasikan kembali lahan pertanian menjadi non-pertanian untuk menghindari redistribusi (Gaw, 2024; Respicio, 2024).

Ketidakadilan dalam kepemilikan tanah masih jadi masalah utama di Filipina. Sebagian besar tanah dikuasai oleh sedikit orang kaya atau perusahaan besar, sementara sebagian besar petani tidak punya tanah sama sekali atau hanya punya lahan yang sangat kecil. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural

yang terus-menerus. Program pemerintah untuk membagikan tanah (CARP dan perpanjangannya CARPER) belum berhasil mengubah kondisi ini secara mendasar.

CARP (*Comprehensive Agrarian Reform Program*) adalah program reformasi agraria di Filipina yang bertujuan untuk redistribusi tanah pertanian kepada para petani tak bertanah dan pekerja pertanian. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Republik No. 6657, yang dikenal sebagai Undang-Undang Reformasi Agraria Komprehensif (CARL) yang ditandatangani pada tahun 1988 di bawah pemerintahan Presiden Cory Aquino. CARP bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan tanah milik pribadi dan publik kepada para penerima program (*beneficiaries*) yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memiliki dan mengolah tanah sendiri. Implementasi CARP mengalami berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pemilik tanah besar dan isu-isu pendanaan, yang menyebabkan program ini diperpanjang menjadi CARPER (*CARP Extension with Reforms*) pada tahun 2009 (Republic Act No. 9700) (Department of Agrarian Reform).

Bahkan ada kritik bahwa program tersebut sudah waktunya "dilepaskan" karena kurangnya efektivitas (Fabella 2019). Dari tahun 2021 sampai 2024, proses pembagian tanah kepada petani penerima manfaat (ARB) berjalan sangat lambat. Ini sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, penolakan dari pemilik tanah, dan cara-cara pembagian tanah yang tidak langsung, seperti opsi pembagian saham. Konflik lahan yang terus berlanjut di Filipina juga menyoroti bagaimana isu ini berdampak pada berbagai aspek masyarakat (Climate-Diplomacy 2022).

Pada tahun 2021, ketidakadilan kepemilikan tanah di Filipina tetap menjadi masalah serius, dengan statistika nasional yang menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang substansial yaitu 40.7% (Reyes 2023). Angka ini mengindikasikan bahwa distribusi aset produktif, termasuk lahan, sangat tidak merata. Ketimpangan yang tinggi ini secara langsung menghambat tujuan reforma agraria, yaitu pemerataan kepemilikan lahan, karena sebagian kecil elite terus menguasai mayoritas tanah, meninggalkan mayoritas petani tanpa akses yang memadai.

Laju distribusi lahan kepada petani penerima manfaat (ARBs) sangat lambat, dengan hanya 17.640 sertifikat tanah yang didistribusikan antara Maret 2021 hingga Juni 2022 (Philippine News Agency 2024). Angka ini menunjukkan bahwa program reforma agraria tidak berjalan sesuai harapan, gagal memenuhi target distribusi lahan yang ambisius. Banyak petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat (ARBs) masih terjebak dalam sengketa lahan atau hanya menerima sebagian kecil dari lahan yang dijanjikan.

Pada tahun 2022, data dari *Census of Agriculture and Fisheries* (CAF) mengungkapkan gambaran yang lebih spesifik tentang ketidakadilan lahan. Dari sekitar 19.68 juta individu di sektor pertanian, hanya 21.8% yang memiliki atau memiliki hak yang aman atas lahan pertanian (Philippine Statistics Authority 2024). Ini berarti mayoritas petani masih tidak memiliki kepastian kepemilikan atas lahan yang mereka garap. Rendahnya proporsi petani dengan hak atas tanah yang aman ini menjadi penghalang utama bagi keberhasilan reforma agraria. Tanpa kepastian kepemilikan, petani tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas lahan mereka, sulit mengakses kredit, dan rentan

terhadap penggusuran, yang semuanya melemahkan tujuan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesenjangan gender juga sangat mencolok, dimana hanya 29.9% perempuan memiliki hak atas tanah yang aman, dibandingkan dengan 70.1% laki-laki (Philippine Statistics Authority 2024). Ini menunjukkan bahwa perempuan petani menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses dan menguasai lahan. Di Negros Occidental, perjuangan petani tebu untuk mendapatkan hak atas tanah terus berlanjut. Banyak ARBs yang telah lama menunggu, masih menghadapi taktik dari pemilik tanah lama untuk merebut kembali lahan, termasuk intimidasi dan gugatan hukum yang mahal (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 2023).

Studi kasus di Negros ini menunjukkan bagaimana resistensi pemilik tanah dan penggunaan taktik hukum yang mahal dapat secara efektif menggagalkan distribusi lahan yang telah ditetapkan oleh reforma agraria. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi petani, serta menunjukkan bahwa kerangka hukum reforma agraria masih memiliki kelemahan dalam penegakan yang efektif (Behind Philippine 2021).

Pada tahun 2023, meskipun ada upaya pemerintah Marcos Jr. untuk mempercepat distribusi sertifikat tanah dan mengampuni utang melalui *New Agrarian Emancipation Act* (Department of Agrarian Reform 2023), masalah mendasar ketidakadilan lahan masih belum terselesaikan sepenuhnya, yang secara signifikan menghambat reforma agraria. Penghapusan utang memang meringankan beban finansial petani, tetapi kebijakan ini tidak secara langsung mengatasi masalah kelangkaan lahan untuk didistribusikan, yang merupakan inti

dari reforma agraria. Artinya, meskipun petani dibebaskan dari beban utang, banyak dari mereka masih tidak memiliki lahan yang cukup atau sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap (DAR 2023).

Data menunjukkan bahwa laju akuisisi dan distribusi lahan baru kepada petani pada tahun 2023 masih lambat. Berdasarkan catatan DAR yang diperoleh oleh kelompok petani *Task Force Mapalad* (TFM), hanya 12.254 hektar lahan pertanian swasta yang didistribusikan pada tahun 2023 di bawah program akuisisi dan distribusi lahan (LAD) secara nasional (Focus on the Global South 2024, 1). Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (10.308 hektar pada 2020 dan 14.318 hektar pada 2021) (LiCAS.news 2023). Keterlambatan ini menunjukkan bahwa mekanisme implementasi reforma agraria masih belum efisien atau menghadapi resistensi yang kuat, sehingga menghambat kemajuan dalam pemerataan kepemilikan lahan (Philippine Statistics Authority 2024).

Untuk tahun 2024, tren ketidakadilan kepemilikan tanah diproyeksikan akan terus berlanjut. Meskipun pemerintah menargetkan distribusi lebih banyak sertifikat tanah, tantangan struktural yang mendasari ketidakadilan lahan masih ada. Kebijakan yang cenderung pro-investasi asing di sektor pertanian dan proyek-proyek pembangunan skala besar berpotensi mempercepat konsolidasi lahan di tangan korporasi besar, yang dapat semakin meminggirkan petani kecil dan masyarakat adat (NLC Ph Report 2024).

Secara historis, CARP upayanya dalam hal pendistribusian lahan. Sejak program ini dimulai pada tahun 1972 sampai dengan tahun 2022, telah terdistribusikan dan didaftarkan sekitar 4,85 juta hektar lahan pertanian (CPBRD

2024). Angka ini menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik, yaitu 88,8% dari target nasional yang telah direvisi sebesar 5,46 juta hektar (CPBRD 2024). Basis data historis yang luas ini sangatlah penting untuk memberikan konteks terhadap kinerja program saat ini dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai selama periode 2020-2024.

Tabel 1. CARP Distribusi Lahan (Hectares) di Filipina Tahun 2020-2024

Tahun	Distribusi Lahan (Ha)
2020	46,120
2021	40,574
2022	25,159
2023	84,044
2024	120,343

Sumber: media.dar.gov.ph 2020-2024

Angka-angka dari DAR dengan tegas menunjukkan peningkatan substansial dalam hektar yang didistribusikan dari paruh kedua tahun 2022 (25.159 ha) hingga tahun 2023 (84.044 ha) dan tahun 2024 (120.343 ha) (DAR 2022). Hal ini, secara eksplisit dinyatakan sebagai "peningkatan 24 persen" pada akhir tahun 2022, "peningkatan 296 persen" pada tahun 2023, dan "peningkatan 480 persen" pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. *Trend* Reforma Agraria Filipina 2021–2024

Tahun	Fenomena
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan kepemilikan tanah sangat tinggi (40,7%) 2. Hanya 17.640 sertifikat tanah didistribusikan (Mar 2021–Jun 2022) 3. Program CARP/CARPER dinilai tidak efektif
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya 21,8% petani memiliki hak atas lahan 2. Ketimpangan gender dalam kepemilikan: 29,9% perempuan vs. 70,1% laki-laki 3. Studi kasus Negros Occidental: intimidasi & gugatan terhadap ARBs 4. Kesenjangan hukum dan implementasi reforma agraria
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>New Agrarian Emancipation Act</i> dengan penghapusan utang petani 2. Masalah kelangkaan lahan tetap belum terselesaikan 3. Hanya 12.254 hektar lahan didistribusikan (penurunan dari 2021) 4. Program LAD lambat, masih banyak resistensi pemilik tanah
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyeksi ketidakadilan lahan masih berlanjut 2. Kebijakan pro-investasi asing dan pembangunan mempercepat konsolidasi lahan oleh korporasi 3. CARP sejak 1972 telah distribusikan 4,85 juta ha (88,8% target nasional)

Sumber: Diolah sendiri oleh penulis 2021-2024

2.1.2 Politik Agraria di Bawah Duterte & Marcos Jr Tahun 2021-2024

Arah politik agraria Filipina pada periode ini sangat dipengaruhi oleh agenda kebijakan dua pemerintahan. Pada sisa masa jabatan Presiden Duterte yakni hingga pertengahan 2022, fokus utama pemerintah adalah program infrastruktur ambisius "*Build, Build, Build*". Meskipun bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi, program ini seringkali memicu konversi lahan pertanian

skala besar untuk pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri. Kebijakan ini secara tidak langsung melemahkan semangat reforma agraria karena memprioritaskan penggunaan lahan untuk non-pertanian (Borras Jr. dan Franco 2022, 112). Selain itu, retorika anti-pemberontakan yang gencar digunakan oleh pemerintahan Duterte sering kali menysar para aktivis petani dan pemimpin masyarakat adat yang menuntut hak atas tanah, sebuah praktik yang dikenal sebagai *red-tagging*.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. sejak Juli 2022, terdapat pergeseran retorika yang signifikan. Marcos Jr., yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, berjanji untuk merevitalisasi sektor agrikultur dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan populis yang ia luncurkan adalah *New Agrarian Emancipation Act* (Republic Act No. 11953) pada tahun 2023. Undang-undang ini menghapuskan seluruh utang yang belum terbayar dari para petani penerima manfaat program reforma agraria, termasuk bunga dan denda, senilai miliaran peso. Secara teoritis, kebijakan ini membebaskan petani dari beban finansial yang menghambat produktivitas mereka (Department of Agrarian Reform 2023).

Namun kebijakan ini, meskipun positif, tidak mengatasi akar masalah, yaitu kelangkaan lahan untuk didistribusikan. Tanpa adanya upaya serius untuk mengakuisisi dan mendistribusikan lahan-lahan pribadi yang luas, penghapusan utang hanya akan memberikan kelegaan sesaat. Di sisi lain, pemerintahan Marcos Jr. juga melanjutkan kebijakan yang pro-agribisnis dan membuka pintu bagi investasi asing di sektor pertanian, yang dikhawatirkan akan semakin

meminggirkan petani kecil dan mempercepat liberalisasi pasar pertanian (Department of Agrarian Reform 2023).

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Agraria antara Era Duterte dan Marcos JR 2021-2024

Tahun	Pemerintahan	Kebijakan	Dampak
2021	Duterte	Lanjutan program ‘ <i>Build, Build, Build</i> ’ dan Penguatan <i>National Task Force to End Local Communist Armed Conflict</i> (NTF-ELCAC).	Peningkatan laju konversi lahan dan kriminalisasi dan <i>red-tagging</i> terhadap aktivis petani yang menolak proyek.
2022	Transisi	Penurunan intensitas proyek infrastruktur besar menjelang pemilu, janji kampanye Marcos Jr. untuk revitalisasi pertanian.	Ketidakpastian kebijakan, harapan baru di kalangan petani atas janji penghapusan utang.
2023	Marcos Jr.	Pemberlakuan <i>New Agrarian Emancipation Act</i> (RA 11953), peningkatan impor beras untuk stabilisasi harga.	Pembebasan dari utang CARP namun menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang menekan harga jual gabah lokal.
2024	Marcos Jr.	Fokus pada peningkatan produktivitas melalui teknologi dan konsolidasi lahan, pembukaan investasi asing di agribisnis.	Potensi terpinggirkan dari program modernisasi risiko kehilangan kontrol atas lahan melalui skema konsolidasi.

Sumber: Diolah oleh penulis tahun 2021-2024

2.1.3 Alih Fungsi Lahan Tahun 2021-2024

Filipina adalah salah satu negara dengan cadangan mineral terkaya di dunia, dan sektor pertambangan memiliki dampak signifikan pada penggunaan lahan. Pada tahun 2024, sekitar seperlima dari total luas daratan Filipina, atau sekitar 6 juta hektar, tercakup oleh izin pertambangan dan eksplorasi (Global Witness 2024). Meskipun ini adalah area yang diizinkan untuk aktivitas pertambangan, luas lahan yang sebenarnya telah diubah atau terganggu oleh operasi pertambangan aktif lebih kecil.

Kasus Proyek Emas dan Tembaga Didipio yang dioperasikan oleh *OceanaGold Philippines, Inc.* (OGPI) di Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya, menjadi contoh nyata dari dampak alih fungsi lahan akibat pertambangan. Proyek ini, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, kembali menjadi sorotan tajam ketika *Financial or Technical Assistance Agreement* (FTAA) perusahaan diperbarui pada tahun 2021 oleh pemerintah Filipina, meskipun ada penolakan keras dari komunitas lokal dan pemerintah provinsi (Global Witness 2022, 45). Perpanjangan izin ini memungkinkan OGPI untuk melanjutkan dan bahkan berpotensi memperluas operasinya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi juga merupakan tanah leluhur bagi suku adat Bugkalot dan Ifugao, serta lahan pertanian bagi ribuan petani (Global Witness 2022).

Ekspansi dan operasi pertambangan skala besar ini telah menyebabkan konversi signifikan lahan pertanian dan hutan, yang sebelumnya menjadi sumber mata pencarian utama bagi komunitas. Ribuan petani penggarap dan masyarakat adat terpaksa menghadapi ancaman penggusuran atau telah kehilangan akses terhadap lahan tradisional mereka karena perluasan area tambang, pembangunan

fasilitas penunjang, dan dampak lingkungan. Sungai-sungai vital seperti Sungai Didipio dan anak-anak sungainya, yang menjadi sumber irigasi untuk sawah dan pasokan air minum, dilaporkan tercemar oleh limbah tailing dan sedimen dari operasi tambang (Mongabay 2021). Pencemaran ini menyebabkan gagal panen, penurunan hasil pertanian, dan masalah kesehatan bagi penduduk setempat, termasuk penyakit kulit dan masalah pencernaan (EJAtlas 2022).

Selain itu, deforestasi besar-besaran untuk membuka area tambang dan infrastruktur terkait telah memperburuk erosi tanah, meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang, terutama selama musim hujan. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan seringkali dianggap tidak adil dan tidak memadai oleh komunitas yang terdampak, tidak mencerminkan kerugian jangka panjang atas lahan, sumber daya alam, dan mata pencarian tradisional mereka (Bankoff 2022).

Akibatnya, banyak keluarga petani yang kehilangan tanah dan mata pencarian terpaksa bermigrasi ke kota atau mencari pekerjaan serabutan di sektor informal, dengan pendapatan yang tidak menentu dan kondisi hidup yang jauh lebih buruk. Konflik sosial dan ketegangan antara komunitas lokal yang menolak pertambangan dengan pihak perusahaan dan aparat keamanan juga meningkat, seringkali berujung pada intimidasi, ancaman, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para aktivis dan pemimpin komunitas (Karapatan 2022). Kasus Didipio ini menyoroti bagaimana kebijakan pro-pertambangan, meskipun diklaim untuk pembangunan ekonomi, dapat memperburuk krisis agraria dan kemiskinan di tingkat akar rumput.

Lahan-lahan sawah beririgasi yang vital untuk ketahanan pangan diubah menjadi lapangan golf atau kompleks perumahan elite. Data dari berbagai NGO menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama periode ini, di mana ribuan hektar lahan pertanian hilang setiap tahunnya. Kehilangan lahan berarti kehilangan sumber pendapatan utama, memaksa banyak keluarga petani untuk bermigrasi ke kota dan menjadi bagian dari sektor informal yang rentan (Karapatan 2020).

Tabel 4. Tabel Jumlah Lahan yang Terkena Eksploitasi dan Jumlah Proyek Penambangan Legal di Filipina Tahun 2020-2023

Tahun	Luas Lahan/Ha	Penambangan Mineral/proyek
2020	763,899	79
2021	764,375	111
2022	764,748	115
2023	755,960	120

Sumber: mgb.gov.ph 2020 - 2023.

Data pada 2024 belum tersedia di laporan tahunan milik badan pemerintah *Mines and Geosciences Bureau* (MGB), sebuah lembaga pemerintah dibawah *Department of Environment and Natural Resources* (DENR) Filipina.

Jumlah proyek pertambangan mineral di Filipina meningkat dari 79 proyek pada 2020 menjadi 120 proyek pada 2023, atau naik sekitar 51,9%, sementara luas lahan yang dieksploitasi mengalami sedikit fluktuasi (Mines and Geosciences Bureau, 2023). Pada tahun 2023, luas lahan yang digunakan untuk pertambangan turun menjadi 755.960 hektare, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 764.748 hektare, meskipun jumlah proyek terus bertambah (Philippine Statistics Authority, 2023).

2.1.4 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024

Perjuangan untuk hak atas tanah di Filipina seringkali berakhir dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Petani, aktivis reforma agraria, dan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka dari pengambilalihan oleh perusahaan atau proyek pemerintah menghadapi intimidasi, ancaman, gugatan hukum palsu (Strategic Lawsuit Against Public Participation - SLAPP), penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan di luar hukum. Praktik *red-tagging*, atau penuduhan individu dan organisasi sebagai komunis atau teroris oleh aparat negara, menjadi alat yang efektif untuk mendelegitimasi perjuangan mereka dan membenarkan tindakan kekerasan.

Laporan dari organisasi HAM lokal dan internasional secara konsisten menempatkan Filipina sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi para pembela tanah dan lingkungan. Selama periode 2021-2024, meskipun intensitasnya sedikit berubah-ubah, kasus-kasus pelanggaran HAM terkait sengketa lahan terus terjadi. Kelompok seperti Karapatan dan *Global Witness* mendokumentasikan puluhan kasus pembunuhan setiap tahun yang menimpa para petani dan aktivis agraria. Kurangnya pertanggungjawaban dan budaya impunitas yang meluas menyebabkan hanya sedikit dari kasus-kasus ini yang berhasil dibawa ke pengadilan, apalagi menghasilkan vonis bersalah bagi para pelaku (Amnesty International 2023). Kekerasan ini menciptakan suasana ketakutan yang dirancang untuk membungkam perlawanan dan memuluskan jalan bagi kepentingan komersial atas tanah.

Tabel 5. Data dari Jumlah Korban Akibat Pelanggaran HAM di Filipina 2021-2024

Tahun	Jenis Pelanggaran	Sektor Terdampak	Jumlah Korban
2021	Pembunuhan di Luar Hukum	Pembela Tanah & Lingkungan	19
		Aktivis HAM (termasuk buruh/petani)	11
	Penghilangan Paksa	Organisator Petani	1
2022	Pembunuhan di Luar Hukum	Pembela Tanah & Lingkungan	11
		Petani/Buruh	4
	Penyiksaan	Petani, Masyarakat adat dan Aktivis	45
2023	Pembunuhan di Luar Hukum	Pembela Tanah & Lingkungan	10
		Sektor Terkait Konflik Tanah	9
	Penghilangan Paksa	Pembela Tanah & Lingkungan	14
		Aktivis Lingkungan dan hak adat	5
2024	Pembunuhan di Luar Hukum	Petani (di bawah rezim Marcos Jr.)	59
	Penghilangan Paksa	Berbagai Sektor (di bawah rezim Marcos Jr.)	15

Sumber: Karapatan Report 2021-2024

Pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari isu-isu reformasi agraria di Filipina tetap menjadi perhatian serius dari tahun 2021 hingga 2024, ditandai dengan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan kriminalisasi yang meluas (Karapatan 2021, 2024). "Penandaan merah", militerisasi, dan pengejaran proyek pembangunan yang dipimpin korporasi (pertambangan, agribisnis, infrastruktur) tanpa reformasi agraria yang sejati terus menjadi pendorong utama pelanggaran ini (Karapatan 2021, 2024; ANGOC 2021, 2023). Kurangnya akuntabilitas bagi para pelaku mempertahankan siklus kekerasan, menciptakan efek mengerikan pada advokasi hak atas tanah (Karapatan 2021). Petani,

masyarakat adat, dan pembela tanah menanggung beban pelanggaran ini, menyoroti ketidaksetaraan struktural yang mengakar dalam kepemilikan tanah dan kontrol sumber daya (ANGOC 2023).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa jenis pelanggaran yang terjadi memiliki dampak signifikan terhadap isu reforma agraria. Mayoritas korban, terutama dalam kasus pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, adalah pembela tanah dan lingkungan, petani, dan masyarakat adat. Keberadaan mereka yang menjadi sasaran langsung menunjukkan bahwa konflik tanah dan perjuangan untuk hak atas tanah menjadi pemicu utama pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali berkaitan dengan perebutan sumber daya alam dan penolakan terhadap klaim hak atas tanah, yang pada dasarnya menghambat upaya-upaya untuk mewujudkan reforma agraria yang adil (Human Rights Watch. 2023).

Pelanggaran HAM yang terjadi, seperti pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, tidak hanya menimbulkan trauma dan ketakutan bagi para aktivis dan komunitas yang berjuang, tetapi juga secara sistematis melemahkan gerakan reforma agraria. Ketika para pemimpin dan aktivis kunci dihilangkan atau dibunuh, upaya kolektif untuk menuntut keadilan dan distribusi tanah yang merata menjadi terhalang. Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan yang membuat orang enggan untuk berbicara atau bertindak, yang pada akhirnya mengukuhkan kekuasaan pihak-pihak yang menentang reforma agraria (Human Rights Watch 2023; Amnesty International 2024).

Pola pelanggaran HAM maupun kerusakan lingkungan akibat peralihan lahan yang tidak setara, memberikan dampak terhadap kelompok rentan dalam

konflik agraria, peran aktor internasional menjadi krusial dalam mendorong perubahan. Koalisi NGO sebagai salah satu jembatan bagi para petani dan masyarakat adat yang ada di desa untuk dapat menyuarakan ketidakadilan dalam hak atas tanah. NGO agraria yang tergabung dalam *National Land Coalition* yang terdiri dari 9 anggota utama dalam membantu reforma agraria adalah contoh bagaimana upaya global dan lokal dapat berkontribusi pada transformasi kondisi di Filipina.

2.2 Respon Terhadap Tingginya Kebutuhan Reforma Agraria di Filipina

Menghadapi masalah tanah yang rumit dan punya banyak sisi, *National Land Coalition* (NLC) Filipina muncul sebagai salah satu *Non-governmental organization* yang paling vokal dan terorganisir. Dibentuk sebagai wadah bersama bagi berbagai NGO, organisasi petani, lembaga akademik, dan kelompok advokasi, NLC bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria yang benar-benar adil. Tanggapan NLC tidak hanya satu cara, tapi merupakan gabungan strategi yang saling melengkapi. Ini mulai dari melobi kebijakan di tingkat nasional sampai mengorganisir dan memberdayakan masyarakat di tingkat paling bawah (ILC Report 2023).

Gambar 1. Logo *National Land Coalition* di Filipina



Sumber: ILC Contribution Analysis 2023

Strategi utama NLC berpusat pada tiga hal yaitu, lobi kebijakan, peningkatan kemampuan, dan kampanye publik. Pertama, koalisi ini aktif terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dengan mengajukan RUU alternatif seperti *Genuine Agrarian Reform Bill* (GARB), bertemu dengan pembuat kebijakan, dan menerbitkan penelitian kritis untuk menantang pandangan pemerintah (ILC Report 2023). NLC Ph menyoroti kelemahan CARP dan mengusulkan model reforma agraria yang fokus pada pembagian lahan secara gratis dan menyeluruh. Kedua, NLC bekerja langsung dengan komunitas petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum, melatih mereka dalam teknik pertanian berkelanjutan, dan membantu dalam proses klaim tanah dan dokumentasi. Ketiga, melalui media massa dan forum publik, NLC menyuarakan penderitaan para petani, membongkar kasus-kasus pengambilalihan tanah, dan membangun solidaritas yang lebih luas antara masyarakat kota dan desa. NLC Ph secara sistematis mendokumentasikan pelanggaran HAM dan menggunakan data tersebut sebagai alat lobi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara ini, NLC berusaha tidak hanya menanggapi krisis

secara reaktif, tetapi juga secara proaktif membangun dasar untuk tata kelola tanah yang lebih adil di masa depan (ILC Report 2023).

Tabel 6. Tabel Anggota Koalisi beserta Fungsinya

Koalisi	Basis	Fungsi
<i>Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA)</i>	Asia	Fokus pada advokasi <i>platform</i> keluarga petani di Asia dan advokasi data hak atas tanah melalui Inisiatif <i>Land Matrix</i>
<i>Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)</i>	Asia	Memimpin inisiatif terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHR), serta memonitor proses pelaporan SDG
<i>People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR NOW!)</i>	Nasional	Memimpin advokasi legislatif tentang reforma agraria dan keluarga, serta memonitor <i>Comprehensif Reforms on Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER)</i> .
<i>Centre for Agrarian Reform and Rural Development (CARRD)</i>	Nasional	Sekretariat <i>platform</i> NLC, berpartisipasi dalam kegiatan reforma agraria, keluarga petani, keadilan gender, tata kelola sumber daya alam, serta bisnis dan hak asasi manusia.
<i>Cordillera Peoples Alliance (CPA)</i>	Nasional	Fokus pada hak atas tanah dan hak asasi manusia, memimpin kerja terkait hak atas tanah dan hak asasi manusia.
<i>Philippine Association for Intercultural Development (PAFID)</i>	Nasional	Memimpin kebijakan reforma untuk hak atas tanah masyarakat adat dan tata kelola sumber daya alam.
<i>National Confederation of Family Farmers' Organisations (PAKISAMA)</i>	Nasional	Memimpin inisiatif terkait reforma agraria, keadilan gender, keluarga petani, dan

		proyek observatorium tanah nasional dengan ILC dan <i>Land Matrix</i> .
<i>Task Force Mapalad (TFM)</i>	Nasional	Memimpin inisiatif terkait keterlibatan dengan DAR, dan mengimplementasikan sejumlah kegiatan terkait tata kelola sumber daya alam, keadilan gender, dan reforma agraria.
<i>Xavier Science Foundation (XSF)</i>	Nasional	Memberikan dasar pengetahuan untuk implementasi berbagai kegiatan, terutama dalam bidang reforma agraria, keluarga petani, hak atas tanah masyarakat adat, bisnis dan hak asasi manusia, serta tata kelola sumber daya alam.

Sumber: Diolah sendiri oleh Penulis dari ILC Report 2023

Melalui struktur keanggotaan yang kuat dan beragam di tingkat nasional seperti yang terlihat di Filipina, masing masing NGO menunjukkan perannya sebagai aktor transformatif dalam upaya mewujudkan keadilan agraria. Pendekatan partisipatif berbasis komunitas yang dijalankan.

BAB 3

IMPLEMENTASI *NGO COALITION* DALAM REFORMA AGRARIA OLEH *NATIONAL LAND COALITION* DI FILIPINA TAHUN 2021-2024

Menurut Yanacopulos, koalisi NGO adalah aktor strategis yang membentuk jaringan dan koalisi untuk memengaruhi berbagai pihak, dengan fokus pada tujuan, metode pencapaian, dan tingkat komitmen anggota. Penelitian Yanacopulos juga menganalisis faktor-faktor lingkungan, seperti perubahan politik, ekonomi, dan sosial, serta tantangan internal yang memengaruhi strategi organisasi NGO. Dalam artikelnya "*The Strategies that Bind: NGO Coalitions and their Influence*" (2005), Helen Yanacopulos mengidentifikasi tiga strategi utama koalisi NGO, yaitu koalisi, lobi, dan kampanye.

3.1 Koalisi *National Land Coalition* Filipina dalam Membangun Kekuatan Kolektif

National Land Coalition Filipina sebagai sebuah koalisi yang mengorganisir diri dan memanfaatkan sumber daya kolektifnya untuk memajukan agenda reforma agraria. Koalisi, menurut Yanacopulos (2005), adalah bentuk organisasi yang lebih permanen dibandingkan jaringan, melibatkan komitmen yang lebih tinggi dari anggotanya, dan memiliki tujuan strategis yang lebih luas (Yanacopulos 2005, 3). NLC Ph berfungsi sebagai *platform* multi-pemangku kepentingan yang menyatukan berbagai aktor di sektor pertanahan Filipina, memungkinkan koordinasi upaya lobi yang komprehensif.

NLC Ph terdiri dari sembilan anggota *International Land Coalition* (ILC), termasuk tiga Organisasi Rakyat (People's Organizations/POs) nasional yaitu, *Cordillera People's Alliance* (CPA), *Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka* (PAKISAMA), dan *Task Force Mapalad* (TFM). Selain itu, terdapat Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations/CSOs) nasional seperti *Philippine Association for Inter-Cultural Development* (PAFID), *Center for Agrarian Reform and Rural Development* (CARRD), *People's Campaign for Agrarian Reform Network* (AR Now!), *Xavier Science Foundation* (XSF), *Asian Farmers' Association* (AFA), dan *Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development* (ANGOC) (ILC Contribution Analysis 2023 6). NLC Ph juga bermitra dengan non-anggota ILC seperti *National Rural Women Coalition* (PKKK) dan *Broad Agrarian Reform Coalition*, serta tokoh media dan inisiatif sektor keuangan (NLC Ph Report 2024, 6, 8, 19).

NLC Ph beroperasi dengan struktur *ad hoc*, dimana setiap anggota mengambil peran kepemimpinan sesuai kebutuhan strategis inisiatif tertentu (NLC Ph Report 2023, 9; NLC Ph Report 2024, 19). Misalnya, *Task Force Mapalad* (TFM) memimpin keterlibatan dengan *Department of Agrarian Reform* (DAR), sementara AR Now! memimpin lobi legislatif. PAKISAMA berfokus pada *Family farmer dan National Land Observatory* (NLO), PAFID pada hak teritorial masyarakat adat (Indigenous Peoples/IPs) dan tata kelola sumber daya alam, dan ANGOC pada *Business, Land and Human Rights* (BLHR) serta data pertanahan. Sekretariat NLC Ph sendiri memimpin kelompok kerja *Quick Response Mechanism for Land and Environment Defenders* (QRM-LED), keadilan gender, dan tata kelola *platform* (NLC Ph Report 2023, 9).

Pada periode Juni 2021 hingga Juni 2022, NLC Ph aktif dalam keterlibatan kritis dengan pemerintah untuk reforma agraria, pertanian keluarga, dan *Business and Human Rights* (BHR) (NLC Ph Report 2022, 1). Kemitraan dengan DAR dan Bank Dunia diperdalam, menghasilkan masukan dari *agrarian reform beneficiaries* (ARBs), masyarakat adat, dan anggota NLC yang diintegrasikan ke dalam *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) dan kebijakan terkait proyek *Support to Parcelization towards Individual Titling* (SPLIT) yang menjadi proyek pendanaan dari *World Bank* (NLC Ph Report 2022, 1). ESMF sendiri adalah kerangka kerja kebijakan, dan masukan dari NLC Ph dimasukkan ke dalamnya sebagai bagian dari proses perencanaan proyek SPLIT yang didanai oleh *World Bank*. Dengan kata lain, masukan NLC Ph tidak menjadi bagian dari sebuah lembaga, melainkan menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang memandu implementasi proyek NLC Ph juga diikutsertakan sebagai anggota *National Technical Working Group on Lands and Forests* (NTWG-LF), sebuah badan pembuat kebijakan multi-pemangku kepentingan yang mengkoordinasikan perumusan kebijakan lahan antar lembaga pemerintah (NLC Ph Report 2022, 2).

Di bidang pertanian keluarga, NLC Ph melalui kepemimpinan PAKISAMA di *Agriculture and Rural Development Knowledge and Policy Platform* (ARKDPP) berpartisipasi aktif dalam perumusan dan peluncuran *Philippine Action Plan for Family Farming* (PAP4FF). Kemitraan dengan *Department of Agriculture-Agricultural Training Institute* (DA-ATI) menghasilkan inklusi NLC Ph dalam *National Technical Working Group on Family Farming* (NTWG-FF) (NLC Ph Report 2022, 2). Masukan CSOs juga

dimasukkan dalam desain studi dasar tentang pertanian keluarga (NLC Ph Report 2022, 4).

Untuk BHR, NLC Ph menyumbangkan studi kasus untuk studi *Land and Resource Conflict Monitoring* (LRCM) tahunan yang dipimpin ANGOC (NLC Ph Report 2022, 2). Studi ini digunakan sebagai basis bukti untuk meningkatkan kesadaran akan dampak konflik lahan terhadap hak atas tanah dan hak asasi manusia (NLC Ph Report 2022, 5). Sebuah rencana keterlibatan sektor swasta perintis untuk BHR dan *Responsible Agricultural Investments* (RAI) juga dikembangkan dan diimplementasikan, yang mengarah pada kemitraan dengan *Philippine Business for Social Progress* (PBSP) untuk sesi pembelajaran (NLC Ph Report 2022, 5). NLC Ph juga memobilisasi dana darurat dari ILC LED dan NTFP-EP Asia untuk mendukung kebutuhan darurat *Land and Environment Defenders* (LEDs) (NLC Ph Report 2022, 18).

Pada Juli 2022, NLC Ph secara strategis berupaya memastikan capaian dari administrasi sebelumnya dapat diterjemahkan menjadi kemitraan yang berkelanjutan dan diperbarui dengan administrasi Marcos yang baru (NLC Ph Report 2023, 1). Ini terwujud dalam pembentukan hubungan kerja yang baik dengan DAR dan *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP) sejak awal (NLC Ph Report 2023, 1).

Pada Juli 2022, TFM merekomendasikan dan berhasil mengamankan adopsi serta penandatanganan Executive Order 4 tahun 2022, yang mengarahkan moratorium pembayaran kewajiban pokok dan bunga bagi ARBs (NLC Ph Report 2023, 3, 4). Ini adalah langkah "pembangun kepercayaan" dengan administrasi baru. Sepanjang Juli 2022 hingga Juni 2023, DAR menerima pengajuan

setidaknya 453 kasus *Land Acquisition and Distribution* (LAD) untuk ditindaklanjuti, dengan 152 kasus di Pulau Negros menjalani proses peninjauan berkas klaim yang menyeluruh (NLC Ph Report 2023, 2).

Pada Januari 2023, NLC Ph mulai mengoperasikan *in-house Quick Response Mechanism for Land and Environment Defenders* (QRM-LED) yang diusulkan dan didanai melalui hibah LUSH untuk LEDs (NLC Ph Report 2023, 3, 4). Mekanisme ini menyediakan dasar yang kuat bagi NLC untuk menangani kasus-kasus konkret secara kolektif.

Pada Juli 2023, *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA) disahkan. NLC Ph terlibat dalam proses ini melalui anggotanya dan secara langsung sebagai *platform* TFM diakui sebagai anggota formal *National Technical Working Group* (NTWG) untuk menyusun *Implementing Rules and Regulations* (IRR) NAEA, sementara AR Now!, CARRD, dan NLC Ph diberikan status pengamat (NLC Ph Report 2023, 3). Masukan CSO dan petani berhasil diintegrasikan ke dalam IRR NAEA, termasuk jalur partisipasi di tingkat *Provincial Agrarian Reform Committee* (PARComm) dan komitmen pembagian data (NLC Ph Report 2024, 7). NLC Ph juga mendukung masuknya dua nominasi untuk mewakili IP-ARBs dan sektor swasta di *Presidential Agrarian Reform Committee* (PARC), badan pembuat kebijakan tertinggi dalam reforma agraria (NLC Ph Report 2023, 3).

Kemitraan dengan NCIP diperkuat, yang mengarah pada pengembangan dan pengujian model resolusi konflik di domain leluhur (NLC Ph Report 2024, 3). NCIP secara sukarela mengusulkan kemitraan formal melalui *Memorandum of Agreement* untuk melembagakan pembagian data, mobilisasi sumber daya, dan tindakan bersama dalam melindungi serta mempromosikan hak teritorial

masyarakat adat (NLC Ph Report 2024, 3). NCIP juga meminta masukan dari NLC Ph mengenai revisi Administrative Order tentang *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) (NLC Ph Report 2024, 4).

Hubungan erat NLC Ph dengan organisasi akar rumput, khususnya melalui pemberdayaan POs dan pemanfaatan "data rakyat", berfungsi sebagai sumber legitimasi yang krusial, memungkinkan untuk secara efektif menjembatani realitas lokal dengan upaya lobi nasional dan internasional, seperti yang disoroti oleh Yanacopulos (2005). Praktik eksplisit NLC Ph dalam memberdayakan POs untuk "berbicara atas nama mereka sendiri" (NLC Ph Report 2023, 8) dan kepemimpinan mereka dalam menentukan prioritas *platform* (NLC Ph Report 2023, 8) secara langsung mewujudkan hal ini.

Fokus NLC Ph pada pembuatan dan pemanfaatan "data rakyat" melalui pemetaan partisipatif (P3DM/PGIS) mengubah pengalaman komunitas menjadi bukti yang dapat diverifikasi, yang tidak hanya melegitimasi lobi mereka tetapi juga memberdayakan komunitas dengan memberikan mereka agensi dalam pengumpulan data dan kontrol narasi. Yanacopulos (2005) mengidentifikasi informasi sebagai sumber daya, dan pendekatan NLC Ph melangkah lebih jauh.

Dengan secara aktif melibatkan komunitas dalam pembuatan data misalnya, P3DM Dumagat Remontado (NLC Ph Report 202 , 2), mereka tidak hanya mengumpulkan informasi tentang akar rumput tetapi juga memungkinkan akar rumput untuk memproduksinya. Proses ini meningkatkan akurasi dan kredibilitas data ("perubahan yang dapat diverifikasi" (NLC Ph Report 2024, 2)) dan secara bersamaan memperkuat kesadaran komunitas dan pembangunan konsensus. Fungsi ganda data ini sebagai alat untuk legitimasi eksternal dan

pemberdayaan internal menciptakan model lobi yang lebih kuat dan berkelanjutan, mengilustrasikan penerapan informasi yang canggih sebagai sumber daya di bawah RDP (NLC Ph Report 2024, 2).

Tabel 7. Tabel Kegiatan Utama NLC Ph 2021-2024

Tahun	Kerangka Koalisi	Proyek/Inisiatif	Dampak
2021–2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dengan DAR dan Bank Dunia 2. Anggota NTWG-LF 3. Kepemimpinan PAKISAMA di ARKDPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan untuk proyek SPLIT 2. Partisipasi dalam <i>Philippine Action Plan for Family Farming</i> (PAP4FF) 3. Studi kasus <i>Land and Resource Conflict Monitoring</i> (LRCM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi masukan ARB dan IP dalam kebijakan SPLIT 2. Inklusi NLC Ph dalam NTWG-FF 3. Peningkatan kesadaran konflik lahan melalui data LRCM 4. Kemitraan dengan PBSP untuk BHR dan RAI
2022–2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan administrasi Marcos 2. Quick Response Mechanism (QRM-LED) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Executive Order 4 (moratorium utang ARB) 2. Penanganan 453 kasus LAD 3. Hibah LUSH untuk QRM-LED 4. Keterlibatan dalam penyusunan IRR NAEA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kepercayaan dengan pemerintah baru 2. Perlindungan darurat untuk Land Defenders 3. Integrasi masukan CSO dalam IRR NAEA 4. Nominasi wakil IP-ARB dan sektor swasta di PARC

2023–2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kemitraan dengan NCIP 2. Pemetaan partisipatif (P3DM/PGIS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Dumagat Remontado (Montalban, Rizal) 2. Model resolusi konflik domain adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legitimasi "data rakyat" untuk kampanye 2. Konsensus penggunaan lahan komunitas 3. Kemitraan formal NCIP-MoA untuk pembagian data.
-----------	--	---	---

Sumber: Diolah oleh penulis 2021-2024

3.2 Lobi *National Land Coalition* dalam Reforma Agraria di Filipina

Upaya lobi yang dilakukan oleh koalisi NLC Ph selama periode 2021–2022 memperlihatkan konsistensi dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Fokus utama lobi tertuju pada isu-isu strategis seperti reforma agraria, pertanian keluarga (*family farming*), serta Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*Business and Human Rights/BHR*) (NLC Ph Report 2021).

Lobi adalah upaya terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah, dan di Filipina menunjukkan bahwa organisasi ini beroperasi secara efektif dalam sistem politik presidensial yang bikameral. Meskipun kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah, NLC tidak hanya menargetkan Kongres (melalui *Committee on Agrarian Reform* di Senat dan *House of Representative*) tetapi juga badan-badan eksekutif kunci seperti *Department of Agrarian Reform* (DAR) dan *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP). Strategi lobi NLC bersifat multifaset, menggabungkan lobi legislatif, keterlibatan dengan komite parlemen, dan mobilisasi akar rumput, seperti yang terlihat dari upaya mereka untuk mengaktifkan kemitraan dengan

berbagai pemangku kepentingan (NLC Ph Secretariat 2024). Esensi lobi ini bukan sekadar pengaruh, tetapi penciptaan perubahan konkret, seperti kontribusi mereka dalam pengesahan *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA), yang secara substansial mengubah lanskap reforma agraria di Filipina (NLC 2024).

Salah satu bentuk konkret dari lobi ini adalah berhasilnya NLC Ph dalam proses lobi formal dengan menyisipkan masukan ke dalam dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) dan kebijakan proyek *Support to Parcelization of Lands for Individual Titling* (SPLIT) (NLC Ph Report 2022). Selain itu, NLC Ph juga memperoleh posisi penting dalam *National Technical Working Group on Lands and Forests* (NTWG-LF) serta *National Technical Working Group on Family Farming* (NTWG-FF) (NLC Ph 2021).

Lobi ini berfokus pada proyek *Support to Parcelization towards Individual Titling* (SPLIT) kepada *World Bank*. Proses konsultasi kebijakan berlangsung selama bulan September 2021 hingga April 2022 di Filipina (NLC Ph Report 2022, 5). NLC aktif berpartisipasi dalam kegiatan *Environmental and Social Assessment* (ESA) dan *Grievance Redress Mechanism* (GRM) untuk mengumpulkan data dan mengintegrasikan masukan dari para petani penerima reforma agraria (*agrarian reform beneficiaries*), masyarakat adat, dan anggota NLC Ph sendiri ke dalam kerangka kerja kebijakan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) yang menjadi panduan proyek. Pihak yang terlibat adalah NLC Ph dan para anggotanya, *World Bank*, dan *Department of Agrarian Reform* (DAR) (NLC Ph Report 2021).

Memasuki tahun 2022–2023, NLC Ph berhasil memengaruhi arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Marcos Jr. Pencapaian signifikan

pada periode ini meliputi diterimanya kembali 453 kasus *Land Acquisition and Distribution* (LAD) yang sebelumnya terhenti, diterbitkannya *Executive Order* (EO) No. 4 Tahun 2022 yang memberikan moratorium pembayaran cicilan bagi *Agrarian Reform Beneficiaries* (ARB), serta disahkannya *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA) pada 7 Juli 2023 (NLC Ph 2023).

Proses lobi yang terjadi dipimpin oleh *Task Force Mapalad* (TFM) pada Juli 2022 di Filipina. Proses ini terjadi melalui pertemuan langsung dengan pihak-pihak dalam administrasi yaitu *Department of Agrarian Reform* (DAR) dan *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP). Hasil dari lobi ini adalah adopsi dan penandatanganan *Executive Order* 4 tahun 2022 yang mengesahkan moratorium pembayaran bagi agrarian reform beneficiaries (ARBs) oleh presiden Marcos Jr (NLC Ph Report 2022)

Pada periode selanjutnya yaitu pada 2023–2024, koalisi NLC Ph semakin menguatkan pengaruhnya dengan memperoleh posisi sebagai pengamat sekaligus Wakil Ketua dalam *Technical Working Group* (TWG) untuk penyusunan *Implementing Rules and Regulations* (IRR) dari NAEA. Keterlibatan ini memungkinkan masuknya suara organisasi masyarakat sipil (CSO) dan petani dalam proses perumusan kebijakan (NLC Ph Report 2023).

Lobi untuk NAEA dilakukan melalui partisipasi langsung dalam *National Technical Working Group* (NTWG) di kota Quezon, Filipina pada tahun 2023. Setelah NAEA disahkan pada Juli 2023, NLC Ph berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan NTWG untuk menyusun *Implementing Rules and Regulations* (IRR). Pihak-pihak yang terlibat dalam lobi ini adalah NLC Ph melalui anggotanya (TFM, AR Now!, CARRD), serta pihak pemerintah dalam NTWG yaitu

Department of Agriculture, Philippine Statistics Authority, dan NCIP (NLC Ph Report 2023).

Dalam periode ini, tekanan lobi NLC Ph terhadap *Land Bank of the Philippines* (LBP) dan kantor pusat *Department of Agrarian Reform* (DAR) juga membuahkan hasil, yaitu distribusi tanah seluas 2.399 hektare kepada 1.571 ARB, serta tambahan 2.399 hektare lainnya kepada 2.034 ARB (NLC Ph Report 2024). Selain itu, masukan dari CSO serta *Indigenous Peoples and Local Communities* (IPLC) berhasil diintegrasikan ke dalam *Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan* (PBSAP) dan kebijakan *Other Effective Conservation Measures* (OECM) (NLC Ph Report 2024).

Manuver politik dan pemanfaatan sekutu strategis anggota koalisi NLC Ph menunjukkan ketangkasan politik dalam menghadapi dinamika transisi kekuasaan. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan situasi politik sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama, terutama dengan dukungan dari organisasi antar-pemerintah (IGO) seperti *World Bank*, FAO, IFAD, dan UNDP. Dukungan dari IGO ini menjadi titik pengaruh strategis dalam mendorong reformasi. Keberadaan sekutu internal di lembaga sasaran seperti DAR atau *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP), serta pengaruh dari lembaga eksternal seperti *World Bank*, terbukti penting untuk memperkuat posisi lobi (NLC Ph Report 2024). Hal ini, selaras dengan pemikiran Yanacopulos mengenai pentingnya *insider strategy* dalam memengaruhi arah kebijakan.

Secara implisit, NLC Ph menerapkan strategi *dual-track* dengan cara bekerja dari dalam sistem (misalnya lewat keikutsertaan dalam TWG pemerintah) sekaligus tetap menjaga tekanan dari luar melalui mobilisasi publik. Strategi ini

tidak hanya menunjukkan respons terhadap peluang kebijakan, tetapi juga mencerminkan pendekatan jangka panjang yang terstruktur (Yanacopulosa 2005).

Konsistensi NLC Ph dalam mendorong kebijakan penting seperti EO 4, NAEA, keterlibatan dalam NTWG, serta integrasi dalam PBSAP menunjukkan kedalaman pemahaman kelembagaan dan kemampuan untuk beradaptasi lintas pemerintahan. Keberhasilan ini menandakan bahwa NLC Ph tidak sekadar melakukan lobi sesaat (*transactional lobbying*), melainkan telah membangun infrastruktur lobi yang kuat dan berkelanjutan. Posisi permanen mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti NTWG-LF, NTWG-FF, dan TWG IRR NAEA membuktikan bahwa NLC Ph aktif membentuk lanskap kebijakan, bukan hanya meresponsnya (NLC Ph Report 2024).

Dengan membangun model resolusi konflik bersama NCIP, NLC Ph menunjukkan upaya untuk menjadikan lobi sebagai bagian dari transformasi institusional. Strategi ini membuat kerja-kerja lobi mereka tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berpengaruh dalam jangka panjang.

Table 8. Rangkaian Lobi yang dilakukan oleh NLC Ph serta Capaiannya

Tahun	Lobi	Tujuan	Strategi	Hasil
2021–2022	Reforma agraria, pertanian keluarga, Bisnis & HAM (BHR)	Memengaruhi kebijakan agraria dan perlindungan petani	1. Masukan ke dokumen ESMF & SPLIT 2. Keterlibatan dalam NTWG-LF & NTWG-FF	1. Masukan diadopsi dalam ESMF & SPLIT 2. Posisi di NTWG-LF & NTWG-FF
2022–2023	Pemerintahan baru (Presiden Marcos Jr.)	Memastikan kebijakan pro-petani di bawah pemerintahan baru	1. lobi langsung ke DAR & LBP 2. Kolaborasi dengan IGO (FAO, UNDP)	1. 453 kasus LAD dilanjutkan 2. EO No. 4 (moratorium cicilan ARB) 3. Disahkannya NAEA (2023)
2023–2024	Implementasi NAEA, distribusi tanah, kebijakan keanekaragaman hayati	Memastikan implementasi pro-petani & inklusi suara masyarakat sipil	1. Menjadi Wakil Ketua TWG IRR NAEA 2. Melakukan lobi ke LBP & DAR 3. Integrasi CSO/IPLC dalam PBSAP	1. Distribusi 2.399 ha ke 1.571 ARB (+ 2.399 ha ke 2.034 ARB) 2. Masukan di PBSAP & OECM 3. Model resolusi konflik dengan NCIP

Sumber: Diolah oleh penulis 2021-2024

3.3 Kampanye *National Land Coalition* dalam Mendorong Perubahan

Reforma Agraria di Filipina

Strategi kampanye yang dijalankan oleh NLC Ph mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, kegiatan lobi dan mobilisasi dilakukan pada tingkat lokal hingga nasional untuk isu-isu tertentu, seperti proyek *Support to Parcelization of Lands for Individual Titling*

(SPLIT) dan *Participatory Action Planning for Family Farming* (PAP4FF) pada 2021–2022 (NLC Ph Report 2021). Namun, dalam periode selanjutnya, NLC Ph mampu mengorganisir mobilisasi berskala besar, seperti aksi 200 petani pada Februari 2024 dan 400 petani dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-36 *Comprehensive Agrarian Reform Program* (CARP) pada Juni 2024 (NLC Ph Report 2024). Keberhasilan ini menunjukkan kapasitas NLC Ph dalam memperluas skala mobilisasi secara taktis untuk mencapai pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan.

Pada periode Juni 2021 hingga Juni 2022, NLC Ph memproduksi *podcast* PAP4FF untuk inisiatif popularisasi (NLC Ph Report 2022, 4). Ini adalah contoh penggunaan media untuk diseminasi pesan dan membangun kesadaran publik, sejalan dengan konsep kampanye "*outsider*" Yanacopulos (2005) yang memanfaatkan media untuk memobilisasi dukungan.

Pada tahun 2022, *on-foot march* yang diikuti oleh perwakilan *Family Farmer Organizations* (FFOs) dari seluruh negeri untuk mendukung kandidat Presiden Maria Leonor Robredo menunjukkan kekuatan mobilisasi akar rumput (NLC Ph Report 2022, 4). Ini adalah taktik "*outsider*" klasik yang bertujuan untuk memengaruhi agenda politik dan menunjukkan mandat akar rumput yang kuat. Lima pernyataan solidaritas yang diterbitkan terkait pengoperasian *Quick Response Mechanism for Land and Environment Defenders* (QRM-LED) diliput oleh media cetak, TV, radio, dan media sosial (NLC Ph Report 2024, 6). Penggunaan media ini adalah upaya NLC Ph untuk menekan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting, yang merupakan ciri khas kampanye (Yanacopulos 2005).

Gambar 2. Aksi Jalan Kaki Petani Sumilao dari Bukidnon ke Manila Dukung Leni Robredo



Farmers from Sumilao, Bukidnon have begun a combination of caravan and march from Bukidnon province in Mindanao all the way to Manila to campaign for Vice President Maria Leonor Robredo, who is running for president in tandem with Sen. Francis Pangilinan, The farmers said it was their way of expressing gratitude to Robredo who helped them in their fight to reclaim their ancestral domain. Photo shows the farmers marching upon their arrival in Cagayan de Oro Sunday, April 3. JIGGER J. JERUSALEM

Sumber: INQUIRER.net

Gambar ini menunjukkan sekelompok petani dari Sumilao, Bukidnon, yang sedang melakukan aksi "*Lakad ng mga Pamilyang Magsasaka*" sebuah kombinasi perjalanan caravan dan *long march* dari Mindanao ke Manila sejauh 2000 km (dengan 400 km jalan kaki). Aksi ini dilakukan mulai 28 Maret hingga 7 Mei 2022, sebagai bentuk dukungan terhadap Maria Leonor "Leni" Robredo dan Francis "Kiko" Pangilinan dalam Pemilu Presiden Filipina 2022.

Analisis kampanye Leni-Kiko menunjukkan bahwa mereka mem-framing isu agraria bukan sekadar sebagai masalah distribusi lahan, melainkan sebagai fondasi untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pendekatan ini diperkuat oleh rekam jejak Francis "Kiko" Pangilinan sebagai penulis

undang-undang pertanian penting seperti "*Sagip Saka Act*", serta program "*Angat Buhay*" yang dipelopori oleh Leni Robredo, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Para petani mem-framing kampanye ini sebagai harapan tulus, didukung oleh endorsement dari lebih dari 150 organisasi tani yang melihat kejujuran dan rekam jejak nyata sebagai hal yang lebih krusial daripada janji-janji populis. Pandangan ini mencerminkan pemahaman kritis dari basis pendukung bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada integritas pemimpin, menjadikan isu agraria sebagai isu sentral (Peasant Movement 2022).

Sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024, NLC Ph meluncurkan kampanye *Eduardo Cojuangco Junior* (ECJ) di Negros Occidental, yang dipimpin oleh TFM. Kampanye ini menjadi "momen politik penting" yang menunjukkan efikasi gerakan petani dan mendorong lingkungan kebijakan yang mendukung LAD di 4.654 hektar lahan tebu (NLC Ph Report 2024, 5). Kampanye ini memberikan cetak biru tentang cara menggagalkan upaya korporasi agribisnis untuk menggunakan celah prosedural dalam proses pemilihan penerima manfaat SPLIT guna mencegah rekonsolidasi kepemilikan lahan. Ini adalah contoh bagaimana kampanye isu spesifik digunakan sebagai "*wedge*" untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih luas, seperti rekonsolidasi lahan dan penundaan implementasi reforma agraria (Yanacopulos 2005).

Gambar 3. Kampanye yang Dilakukan Oleh *Task Force Mapalad* (TFM) di depan Kantor DAR pada 10 Juni 2024

Philippines | National

Farmers group urges PBBM, DAR chief to expedite land distribution

By Jel Santos

Published Jun 10, 2024 08:04 am



(Contributed Photo)

Farmers from Task Force Mapalad (TFM) flocked to the central office of the Department of Agrarian Reform (DAR) in Quezon City on Monday, June 10, and urged President Marcos to expedite the land distribution process.

Sumber: [mb.gov.ph.com](https://mb.gov.ph)

Gambar ini menunjukkan sekelompok petani yang tergabung dalam *Task Force Mapalad* (TFM) sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat *Department of Agrarian Reform* (DAR) di Quezon City, Filipina, pada hari Senin, 10 Juni 2024. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. (PBBM) dan pihak DAR segera mempercepat proses distribusi lahan. Aksi ini menyoroti ketidakpuasan petani atas lambatnya pelaksanaan reforma agraria, termasuk permintaan untuk mengembalikan kepemilikan lahan dari mantan pemilik besar tanah seperti *Danding Cojuangco* (mb.gov.ph 2024).

Kampanye proaktif "Bantay Lupa" (*Land Watch*) dikembangkan untuk mensistematisasi hubungan QRM-LED dengan data rakyat, kemitraan multi-pemangku kepentingan, dan kampanye kewaspadaan publik, memaksimalkan kondisi ruang sipil yang "kurang keras" di bawah pemerintahan Marcos (NLC Ph Report 2024, 6). Pengembangan kampanye ini menunjukkan kapasitas adaptif NLC Ph untuk menyesuaikan taktik kampanyenya dengan lingkungan politik yang berkembang, bergeser dari fokus kekerasan langsung ke akuisisi lahan yang agresif (Yanacopulos 2005).

Kemitraan dengan tokoh media sosial Jun Sabayton diujicobakan selama mobilisasi peringatan 36 tahun CARP, menjangkau setidaknya 20.000 penonton untuk kampanye peningkatan kesadaran tentang akuisisi lahan skala besar (2024 Report, 6). Halaman Facebook CLUP Now!, yang dioperasikan bersama oleh Sekretariat NLC, memiliki 14.000 pengikut, dan sebuah postingan yang menyerukan Ketua Komite Senat untuk Lingkungan dan Pertanian untuk mendengarkan Undang-Undang NLUA mencapai sekitar 2.000.000 netizen (ILC Contribution Analysis 2023, 11). Pemanfaatan *platform* media baru ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk mengontrol narasi dan memperluas kesadaran publik, meningkatkan "biaya" kelambanan bagi lembaga target (Yanacopulos 2005).

Gambar 4. Postingan Instagram @sabaytones atau Jun Sabayton tentang Hari Jadi *Department of Agrarian Reform*



Sumber: [Instagram.com/sabaytones](https://www.instagram.com/sabaytones)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Jun Sabayton sedang mengikuti sebuah aksi yang terjadi di jalan pada ulang tahun DAR yang ke-36. Pada *caption* yang ditulisnya berartikan "Selamat Hari Ayah! untuk para ayah pekerja keras yang mengolah tanah agar bisa memberi makan keluarga, dan selamat ulang tahun ke-36 untuk DAR (Departemen Reformasi Agraria) yang tanpa henti mempersulit mereka dalam mencari nafkah! Sudah 36 tahun, tapi kamu masih begitu! Selamat ulang tahun Departemen Reformasi Agraria!". tersirat bahwa makna dari *caption* tersebut adalah sindiran langsung kepada DAR.

Pada Februari 2024, 200 petani yang dipimpin oleh TFM melakukan mobilisasi nasional (NLC Ph Report, 4). Pada Juni 2024, 400 petani yang dipimpin oleh TFM dan Koalisi Reforma Agraria yang lebih luas berpartisipasi

dalam mobilisasi nasional pada peringatan 36 tahun *Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)* (NLC Ph Report 2024, 4). Mobilisasi ini menghasilkan liputan media yang berkelanjutan tentang kasus reforma agraria di media cetak, TV, radio, dan media sosial (NLC Ph Report 2024, 4). Penggunaan mobilisasi massa dan seruan kewaspadaan publik yang sering oleh NLC Ph menunjukkan pengerahan taktik "*outsider*" yang strategis untuk melengkapi upaya lobi "*insider*" mereka, menciptakan strategi tekanan multi-arah pada pemerintah dan aktor lainnya (Yanacopulos 2005).

QRM-LED telah dilembagakan sepenuhnya dalam NLC Ph dengan komponen-komponen operasional, termasuk fasilitas sub-hibah in-house, sistem rujukan, komunitas praktik, dan kampanye solidaritas serta kewaspadaan publik (NLC Ph Report 2024, 5). QRM-LED berhasil melayani sekitar 6.000 keluarga, termasuk 3.000 keluarga masyarakat adat, 2.000 keluarga petani kecil, dan 1.000 keluarga nelayan (NLC Ph Report 2024, 5). Perlindungan *Land and Environment Defenders* (LEDs) menjadi kampanye isu vital yang digunakan untuk mengatasi masalah sistemik pelanggaran hak asasi manusia dan penyusutan ruang sipil, berfungsi sebagai "*wedge*" untuk menunjukkan bahwa hak-hak atas tanah tidak dapat ditegakkan tanpa perlindungan bagi para pembelanya (Yanacopulos 2005).

NLC Ph menunjukkan kemampuan untuk melakukan kampanye terkoordinasi multi-level dan secara strategis menentukan waktu tindakannya untuk memaksimalkan dampak. Keterlibatan dari mobilisasi petani hingga lobi di ASEAN, serta peran kepemimpinan spesifik anggota dan integrasi data partisipatif, menunjukkan koordinasi multi-level yang canggih (Yanacopulos 2005).

Respons cepat NLC Ph terhadap Administrasi Marcos yang baru, dengan mengamankan EO 4 dan mendorong NAEA, menunjukkan pemanfaatan momen politik yang strategis. Demikian pula, penggunaan mobilisasi massa untuk menekan lembaga pemerintah pada titik-titik kritis (misalnya, implementasi LAD) mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana waktu dapat mempengaruhi hasil (Yanacopulos 2005). Koordinasi dan penentuan waktu ini memungkinkan NLC Ph untuk secara efektif menavigasi lingkungan yang kompleks dan dinamis, meningkatkan kekuatan kolektifnya.

Tabel 9. Tabel Rangkaian dari Jenis Strategi Kampanye oleh NLC Ph

Tahun	Kampanye Utama	Tujuan Strategis	Aktivitas Kunci	Hasil & Dampak
2021	1. Proyek SPLIT 2. PAP4FF	1. Reformasi kebijakan redistribusi tanah 2. Penguatan pertanian keluarga	1. Lobi dokumen ESMF 2. Produksi podcast PAP4FF	1. Masukan kebijakan diadopsi 2. Diseminasi isu ke publik
2022	1. <i>On-foot march</i> 2. Kampanye QRM-LED	1. Dukung kandidat pro-reforma agraria 2. Perlindungan pembela tanah	1. Aksi jalan kaki nasional 2. 5 pernyataan solidaritas di media	1. Pengaruh agenda politik 2. Liputan media nasional
2023	1. Kampanye ECJ 2. <i>Bantay Lupa</i>	1. Halangi rekonsolidasi lahan korporasi 2. Pantau pelanggaran hak tanah	1. Mobilisasi di Negros Occidental 2. Sistem pelaporan partisipatif 3.	1. Distribusi 4,654 ha lahan tebu 2. Database pelanggaran terstruktur

2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi 200 & 400 petani 2. Kemitraan media sosial 3. QRM-LED terlembagakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan implementasi CARP 2. Bangun narasi publik 3. Perlindungan sistematis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi hari jadi CARP ke-36 2. Kolaborasi dengan Jun Sabayton 3. Sub-hibah & rujukan kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkau 20,000+ penonton 2. 6,000 keluarga terlindungi 3. 2 juta jangkauan Facebook
------	---	---	---	--

Sumber: Diolah oleh penulis

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji Implementasi dari teori *NGO Coalition* dalam Reforma Agraria oleh *National Land Coalition* di Filipina Tahun 2021-2024. Isu reforma agraria di Filipina sudah ada sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga sekarang dan memerlukan perubahan yang harus dilakukan dari berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan kepemilikan lahan di Filipina merupakan persoalan mendasar yang menimbulkan kemiskinan dan konflik sosial di pedesaan. Sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh segelintir elit, sehingga sekitar 70% petani tidak memiliki lahan garap sendiri. *Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)* yang diterapkan sejak 1988 dimaksudkan untuk mendistribusikan lahan secara lebih adil dan meningkatkan produktivitas petani. Meski demikian, implementasi CARP dan perpanjangannya (CARPER 2009–2014) menghadapi hambatan serius yaitu, resistensi pemilik lahan, birokrasi lambat, dan keterbatasan pendanaan, sehingga ketimpangan agraria masih menjadi tantangan utama.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, terbentuklah *National Land Coalition (NLC)* sebagai *platform* koalisi NGO yang melobi reforma agraria. Anggota NLC Filipina adalah beragam organisasi petani, LSM sosial, lembaga keagamaan dan donor, yang bekerja sama mendukung kaum tani tanpa tanah. Strategi utama NLC mencakup pembangunan aliansi luas dan kampanye kebijakan. Misalnya, AR Now! salah satu anggota NLC menjalankan kampanye nasional dan penelitian kebijakan agraria, serta aktif melakukan lobi legislatif untuk RUU reforma

agraria. Melalui jaringan ini, NLC berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan para aktor sosial lainnya untuk memperjuangkan agenda petani kecil, termasuk pengesahan kebijakan pro-petani.

Dampak nyata perjuangan NLC dan mitra-mitranya sudah mulai terlihat. Kolaborasi petani dan LSM anggota NLC berhasil mengamankan pengakuan hak atas lahan bagi ribuan petani. Berdasarkan kerangka teoritis Helen Yanacopulos (2005), temuan penelitian menunjukkan bahwa NLC berhasil menerapkan tiga strategi utama secara efektif. Pertama, melalui pembangunan koalisi yang kuat, NLC mampu menyatukan sembilan NGO inti dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi internasional. Kedua, strategi lobi yang dilakukan berhasil mempengaruhi kebijakan nasional, seperti penerbitan *Executive Order* No. 4/2022 dan disahkannya *New Agrarian Emancipation Act* (NAEA) tahun 2023. Ketiga, kampanye terkoordinasi melalui mobilisasi massa dan media digital berhasil menciptakan tekanan publik yang signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi koalisi NGO yang terorganisir dengan baik mampu menciptakan perubahan kebijakan yang signifikan meskipun menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Keberhasilan NLC dalam mendistribusikan 4.654 hektar lahan dan melindungi 6.000 keluarga petani menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan multisektoral. Temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Filipina, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi perjuangan reforma agraria di negara-negara berkembang lainnya.

4.2 Rekomendasi

Dengan hasil analisa dan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis, penulis memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, studi komparatif dengan koalisi agraria di negara lain seperti Indonesia atau Thailand dapat memberikan perspektif baru. Analisis mendalam tentang dampak gender dalam reforma agraria juga penting untuk memahami kesenjangan yang masih ada. Komunitas internasional dapat berkontribusi melalui dukungan pendanaan untuk pelatihan paralegal petani dan penguatan mekanisme perlindungan pembela tanah.

Bagi pemerintah Filipina, percepatan redistribusi lahan harus menjadi prioritas utama, dengan fokus pada akuisisi lahan *hacienda* dan tanah korporasi. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum dengan melarang praktik *Stock Distribution Option* (SDO) dan mengadopsi kebijakan *anti-red-tagging* yang jelas. Transparansi dalam pelaporan realisasi distribusi lahan per provinsi juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Bernal, T. R., dan E. J. G. Esmaquilan. 2020. "The Implementation of Agrarian Reform in the Philippines under the Duterte Administration: A Policy Review." *Philippine Journal of Public Administration*, 64(1): 1–30
- Borras, Saturnino M., Jr., dan Jennifer C. Franco. 2012. *The Politics of Agrarian Reform in the Philippines: From Aquino to Aquino*. Institute of Social Studies.
- Brown, Ernesto O., Fezoil L. Decena, and Reynaldo V. Ebor. 2018. "The Current State, Challenges and Plans for Philippine Agriculture."
- Fabella, Raul V. 2017. "Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP): Time to Let Go." *Public Policy* 214-228.
- Jack, Gavin, Jagjit Plane, and Sarah Wright. 2022. "Development as Freedom? Insight from Farmer-led Sustainable Agriculture Non-Governmental Organization in the Philippines." *Human Relations* 75, no. 10 (October): 1875-1902. <https://doi.org/10.1177/00187267221090779>.
- Maris, Aldi W., and Tahegga P. Alfath. 2024. "Efektivitas Kebijakan Pertambangan: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Filipina." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 8.
- Pham, T.T., T.L. Hoang, D.T. Nguyen, T.L.C. Dao, H.C. Ngo, dan V.H. Pham. 2019. *The Context of REDD+ in Vietnam: Drivers, Agents and Institutions*. 2nd ed. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Smith, Hank C., Christopher M. Weible, Daniel Nohrstedt, and Karin Ingold. 2018. "The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program."
- Yanacopulos, Helen. 2005. *The Strategies that Bind: NGO Coalitions and their Influence*. Routledge.

Buku

- Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC). 2019. *In Defense of Land Rights: A Monitoring Report on Land Conflicts in Six Asian Countries*. Quezon City: ANGOC.
- Lune, Howard, and Bruce L. Berg. 2017. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. N.p.: Pearson.
- Lumibao, Ruth, and Andrew R. Benares. 2018. "As Landlessness, Land Grabbing Intensifies, So Does Agrarian Unrest." *Bulatlat*. <https://www.bulatlat.com/2018/06/11/landlessness-land-grabbing-intensifies-agrarian-unrest/>.
- Ravanera, R. 2018. "Governance of Agricultural Lands, Ancestral Domains, and Aquatic Resources in the Philippines: CSO Land Monitoring Report in the Philippines 2018." In *State of Land Rights and Land Governance in Eight Asian Countries: Forty Years after the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development*, diedit oleh ANGOC, 222–253.

Laporan

- Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC). 2012. *CSO Land Reform Monitoring in Asia*. Quezon City: ANGOC.

- De Vera, Dave. 2015. The State of Land Administration System in the Philippines: The Proposed Land Administration Reform Act (LARA). Discussion paper prepared for the International Land Coalition National Engagement Strategy in the Philippines.
- Department of Agrarian Reform | Kagawaran ng Repormang Pansakahan. N.d. Diakses 17 Februari 2025. <https://www.dar.gov.ph/>.
- Department of Agrarian Reform (DAR). Joint DAR-DOJ Administrative Order No. 07, Series of 2019: Implementing Rules and Regulations of Executive Order No. 75, Series of 2019 "Directing All Departments, Bureaus, Offices and Instrumentalities of the Government to Identify Land Owned by the Government Devoted to or Suitable for Agriculture For Distribution to Qualified Beneficiaries". June 11, 2019. <https://media.dar.gov.ph/source/2019/06/11/ao-07-implementing-rules-and-regulations-of-executive-order-no-75-series-of-2019-gol-for-distribution.pdf>.
- Human Rights Watch. 2023. "Philippines: Human Rights Developments in 2022." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/philippines>
- ILC Asia: ASIA. ILC contribution analysis 2023 5 philippines. 2023. ILC Asia: ASIA. <https://asia.landcoalition.org/en/>.
- Katarungan. 2023. "Agrarian Reform in the Philippines: A Failed Promise." Katarungan. <https://katarungan.org/agrarian-reform-in-the-philippines-a-failed-promise/>
- Karapatan. 2019. 2019 Karapatan Year-End Report on the Human Rights Situation in the Philippines. <https://www.karapatan.org/report/2019-karapatan-year-end-report/>.
- Karapatan. 2020. 2020 Karapatan Year-End Report. <https://www.karapatan.org/report/2020-karapatan-year-end-report/>.
- Karapatan. 2021. 2021 Karapatan Year-End Report on the Human Rights Situation in the Philippines. <https://www.karapatan.org/report/2021-karapatan-year-end-report/>.
- Karapatan. 2023. Duterte Term-Ender and 2022 Marcos Jr Year-End Report. April 17, 2023. <https://www.karapatan.org/report/duterte-term-ender-and-2022-marcos-jr-year-end-report/>.
- Karapatan. 2024. 2023 Karapatan Year-End Report on the Human Rights Situation in the Philippines. March 12, 2024. <https://www.karapatan.org/3977/>.
- Karapatan. 2025. 2024 Karapatan Year-End Report on the Human Rights Situation in the Philippines. March 26, 2025. <https://www.karapatan.org/4616/>.
- Marzan, A. 2018. State of Agrarian Reform in Agricultural Lands: A Sectoral

Paper.

- Mines and Geosciences Bureau. "Minerals Industry at a Glance." Terakhir dimodifikasi 2 Agustus 2023. https://mgb.gov.ph/images/Mineral_Statistics/MINERALS-INDUSTRY-A-T-A-GLANCE-Updated-02-Aug-2023.pdf.
- Mines and Geosciences Bureau. "Mining Industry Statistics CY 2020 to Q1-2023." Terakhir dimodifikasi 7 Juni 2023. https://mgb.gov.ph/attachments/article/162/MIS_Qtrly-2020-to-Q1-2023-as-of-7-June-2023.pdf.
- Mines and Geosciences Bureau. "Mining Industry Statistics CY 2020 to S1-2023." Terakhir dimodifikasi 24 Agustus 2023. <https://mgb.gov.ph/attachments/article/162/MIS-Qtrly-2020-to-S1-2023-for-UPLOAD-as-of-24-Aug-2023.pdf>.
- Ordinario, C. 2025. "Farm Sector Plunges into Losses." BusinessMirror. <https://businessmirror.com.ph/2025/01/21/farm-sector-plunges-into-losses/>
- Philippine Statistics Authority. 2024. "2022 Census of Agriculture and Fisheries (CAF)." <https://psa.gov.ph/content/2022-census-agriculture-and-fisheries-caf>

Artikel Daring

- Agrarian Reform in the Philippines." YouTube video, 3:45. Posted by "The Legal Guide," May 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=3kvuEEcBSQs>.
- Behind Phillipines, dir. 2024. The Philippines Agriculture Disaster, Explained. Phillipines: Behind Asia Team.
- Castaños, Alekxie, and Raekint F. Corpuz. "Rural Realities: CARP Decades Later." The GUIDON, December 2, 2023. <https://theguidon.com/2023/12/rural-realities-carp-decades-later>.
- Duterte's Agrarian Reform: A Critical Review." Philippine Journal of Development. 2020. <https://www.philippinejournalofdevelopment.org/dutertes-agrarian-reform-a-critical-review>.
- Duterte Wants Presidential Agrarian Reform Council Reconvened." GMA News Online, July 4, 2016. <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/572381/duterte-wants-presidential-agrarian-reform-council-reconvened/story/>.
- EJAtlas. 2022. "Didipio Gold and Copper Mine, Nueva Vizcaya, Philippines." <https://ejatlas.org/conflict/didipio-gold-and-copper-mine-nueva-vizcaya-philippines/>.
- Executive Order No. 75: Expanding the Coverage of the Comprehensive Agrarian Reform Program." Official Gazette of the Republic of the Philippines. 2019. <https://www.officialgazette.gov.ph/executive-order-no-75>.
- Global Witness. "How the Militarisation of Mining Threatens Indigenous Defenders in the Philippines." Global Witness, Accessed June 11, 2025. <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/how-the-militarisation-of-mining-threatens-indigenous-defenders-in-the-p>

- [hilippines/](#).
- Gozum, Iya. "Agri losses due to calamities hit P57.8 billion in 2024." Rappler, January 29, 2025. <https://www.rappler.com/philippines/agriculture-losses-record-2024-due-calamities/>.
- Katarungan. The State of Agrarian Justice in the Philippines: 2023 Report. Manila: Katarungan – An Alliance for Agrarian Justice, 2023.
- LandLinks. Philippines. 2017. <http://www.land-links.org/philippines/>.
- Law Writing Off P58B Land Reform Debts a 'Second Chance' for Farmers." GMA News Online, July 8, 2023. <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/content/875206/law-writing-off-p58b-land-reform-debts-a-second-chance-for-farmers-dar-exec/story/>.
- LandLinks. "Philippines." 2017. <http://www.land-links.org/philippines/>.
- Lumibao, Ruth, and Andrew R. Benares. 2018. "As Landlessness, Land Grabbing Intensifies, So Does Agrarian Unrest." Bulatlat. <https://www.bulatlat.com/2018/06/11/landlessness-land-grabbing-intensifies-agrarian-unrest/>.
- Mongabay. 2021. "Struggle endures for Philippine community pitted against gold miner." <https://news.mongabay.com/2021/11/struggle-endures-for-philippine-community-pitted-against-gold-miner/>.
- New Agrarian Emancipation Act: A Step Forward or Backward?" Philippine Daily Inquirer. July 10, 2023. <https://www.inquirer.net/new-agrarian-emancipation-act-a-step-forward-or-backward>.
- Padillo, Maya M., and Jino Nicolas. "5,000 Hectares of CARP Land in Davao Region 'Problematic'." BusinessWorld Online, January 31, 2018. <https://www.bworldonline.com/the-nation/2018/01/31/120114/5000-hectares-carp-land-davao-region-problematic>.
- Philippine Agriculture: Duterte & Marcos Jr. Reforms." StudyLib. N.d. <https://studylib.net/doc/27640385/lesson-18---duterte-and-marcos-agrarian-reform>.
- Villanueva, Jo. n.d. "Ekspansi kelapa sawit di Filipina Analisis isu-isu keamanan hak atas tanah, lingkungan dan pangan."
- International Land Coalition, dir. 2024. Agrarian Reform in the Philippines. Philippines: n.p.
- USAID. 2017. "Philippines Land Governance Assessment." U.S. Agency for International Development. <https://www.usaid.gov/philippines/land-governance-assessment-2017>